



**PENGADILAN MILITER
I-07 BALIKPAPAN**

LKJIP LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022



**PENGADILAN MILITER
I-07 BALIKPAPAN
JL. SYARIFFUDIN YOES
NO.39 SEPINGGAN
BALIKPAPAN**

 **FAX / TELP :** (0542) 8520024

 **balikpapan@dilmil.org**

 **www.dilmil-balikpapan.go.id**

 **pengadilanmiliterbalikpapan**

 **@Militer07**

 **Pengadilan Militer Bpp**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia- Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga dihaturkan kepada semua pihak, terutama Tim Penyusun sehingga Pelaksanaan Kegiatan ini dapat rampung sesuai dengan waktu yang ditentukan.

LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama tahun 2022 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai. Penyusunan LKjIP ini didasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LKjIP ini Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama tahun 2022 secara umum target kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah berhasil dicapai dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat tercapai. Dalam pencapaian sasaran dan target program kerja tahun 2022, selain adanya faktor pendukung, juga masih ditemui adanya kendala, hal ini akan dijadikan bahan pertimbangan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan program kerja yang akan datang agar hasil yang dicapai dapat lebih baik lagi.

Kami berharap agar LKjIP ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Balikpapan, Januari 2023
Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Thamrin, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13620/P

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar, Hukum	3
C. Isu Strategis (Strategic Issue)	3
D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	4
E. Struktur Organisasi	10
F. Sistematika Penyajian	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. Rencana Strategis	15
B. Visi dan Misi	15
C. Tujuan dan sasaran Strategis	19
D. Indikator Kinerja Utama	24
E. Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022.....	25
F. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
B. Realisasi Anggaran	91
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman di daerah dan Pengadilan Tingkat Pertama di Instansi Mahkamah Agung RI turut serta menjunjung tinggi visi Lembaga Peradilan “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” dengan misi:

- Menjaga kemandirian Badan Peradilan;
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan;
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan diharapkan mampu memberikan kontribusi guna mewujudkan visi Mahkamah Agung RI ke depan, terutama dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana pada tingkat pertama.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN

sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai Instansi pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan. Untuk Itulah Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.

Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mempublikasikan capaian kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan (result) yang dicapainya dan kegagalan tingkat kinerja yang terjadi. Dengan kata lain, tersusunnya LKjIP Tahun 2022 merupakan suatu bentuk pertanggung

jawaban dalam memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan.

B. Dasar Hukum.

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yaitu didasarkan oleh peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut adapun dasar hukum tersebut antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

C. Isu Strategis (Strategic Issue).

Adapun Isu Strategis (Strategic Issue) pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan sistem tata kerja, ruang lingkup kerja dan peningkatan sumber daya manusia pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

2. Penguatan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi pejabat struktural dan fungsional pada Pengadilan.
3. Adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sistem pengadilan dan akses publik.

D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut:



Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 Ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan semenjak tanggal 9 Juli 2004 secara Organisasi, Administrasi dan Finansial berkedudukan/berada di bawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang mengacu pada Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 serta berdasarkan pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).



Wilayah Hukum (jurisdiksi) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan meliputi 2 (dua) Provinsi yaitu:

- Provinsi Kalimantan Timur
- Provinsi Kalimantan Utara

4 (empat) Kota yaitu:

- Kota Samarinda
- Kota Balikpapan
- Kota Bontang
- Kota Tarakan

5 (lima) Kabupaten terdiri dari :

- Kabupaten Kutai Timur
- Kabupaten Berau

- g. Kabupaten Bulungan
- h. Kabupaten Malinau
- i. Kabupaten Nunukan

Mengenai justisiabel Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) berpangkat Kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana (kejahatan) maupun pelanggaran masih berdinam aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya baik itu teknis yudisial maupun non teknis yudisial Peradilan Militer menetapkan visi dan misi sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka terwujudnya badan peradilan yang ideal.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja disuatu lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tugas pokoknya menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. *Tugas Pokok dan Fungsi*

a. *Tugas Pokok*

Mengenai justisiabel Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) berpangkat Kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana (kejahatan) maupun pelanggaran masih berdinas aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya baik itu teknis yudisial maupun non teknis yudisial Peradilan Militer menetapkan visi dan misi sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka terwujudnya badan peradilan yang ideal.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja disuatu lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tugas pokoknya menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dibidang fungsi teknis yudisial bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010-2035. Fungsi teknis tersebut antara lain :

- **Fungsi mengadili (judicial power)** yakni:
 1. Memeriksa dan memutus dalam Peradilan Tingkat Pertama atas perkara-perkara tindak pidana dan pelanggaran yang Terdakwanya adalah prajurit TNI berpangkat Prada sampai dengan Kapten.
 2. Mengatur dan meneruskan permohonan Upaya Hukum Banding, Kasasi, Grasi dan Peninjauan Kembali dalam perkara-perkara yang menjadi wewenanganya.
- **Fungsi pembinaan** yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- **Fungsi pengawasan** yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Pegawai pelaksanaan administrasi perkara, pelaksanaan administrasi umum, di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- **Fungsi Administrasi**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, Administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- **Fungsi Lainnya** antara lain memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

E. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Militer di dasarkan pada PERMA Nomor 7 tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan PERMA Nomor 01 tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan disusun sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan:

- a) Kepala Pengadilan Militer
- b) Wakil Kepala Pengadilan Militer

2. Unsur Kepaniteraan:

Panitera membawahi antara lain:

- a) Panitera Muda Pidana.
 - 1) Pengadministrasi Hukum
 - 2) Pengadministrasi Registrasi Perkara
 - 3) Pengelolaan Perkara
 - 4) Analisis Perkara Peradilan
- b) Panitera Muda Hukum.
 - 1) Pengadministrasi Hukum
 - 2) Pengadministrasi Register Perkara
 - 3) Pengolah Data Informasi dan Hukum

Serta membawahi kelompok jabatan Fungsional :

- (1) Panitera Pengganti
- (2) Pranata Peradilan

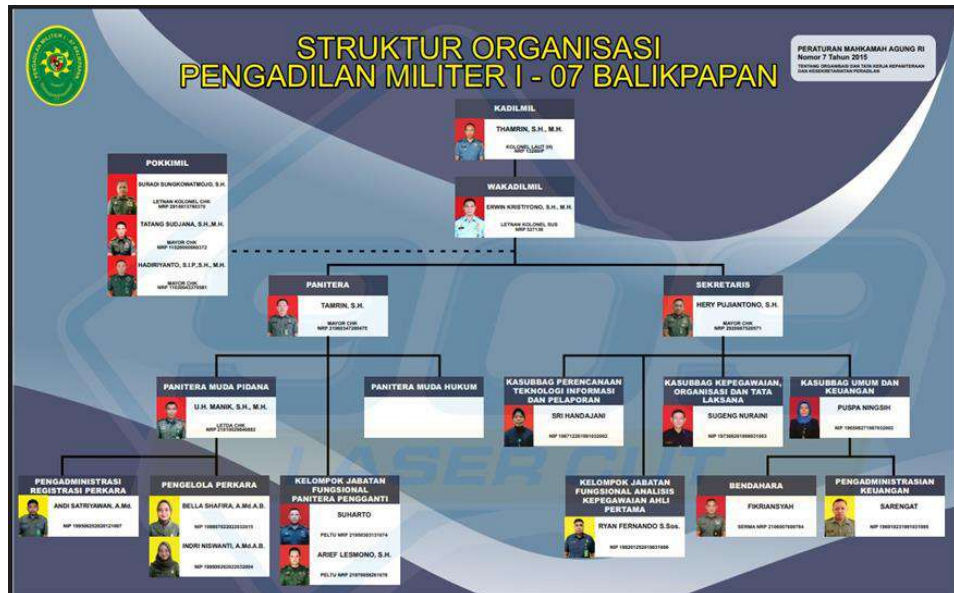
3. Unsur Kesekretariatan

- a. Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
 - 1) Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur
 - 2) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Pengelola Sistem dan Jaringan
- b. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan
 - 1) Penyusun Laporan Keuangan
 - 2) Pengadministrasi Persuratan
 - 3) Bendahara
 - 4) Pengelola Barang Milik Negara
 - 5) Pengemudi
 - 6) Teknisi Sarana dan Prasarana
 - 7) Pranata Barang dan Jasa
 - 8) Pengadministrasi Pustakawan
 - 9) Pranata Kearsipan
 - 10) Ajudan
- c. Kepala Subbagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
 - 1) Analis SDM Aparatur
 - 2) Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
 - 3) Pengelola Kepegawaian

4. Unsur Pelaksana:

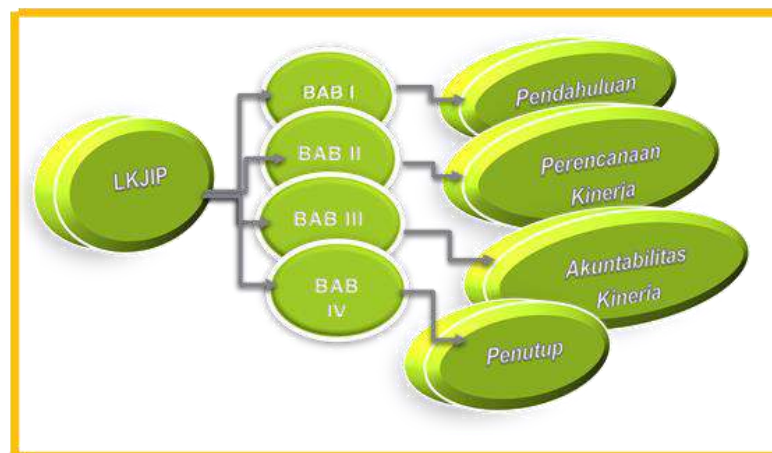
Unsur Jabatan Fungsional Kelompok Hakim Militer.

Struktur Organisasi Pengadilan Militar I-07 Balikpapan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



F. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan informasi pencapaian kinerja Pengadilan Militar I-07 Balikpapan dan evaluasi beberapa analisa kinerja guna peningkatan kinerja ditahun berikutnya. Adapun sistematika penyusunan LKjIP adalah sebagai berikut:



BAB I – Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategisc issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB I –Perencanaan Kinerja.

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV – Penutup.

Pada sub ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja (PK) Satker.
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
3. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II ***PERENCANAAN KINERJA***

A. Rencana Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Renstra 2020-2024 yang dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2021-2025 .

B. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Visi

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN YANG AGUNG”

Visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melakukan aktifitasnya.

Dalam pernyataan visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut:

- a) Pengertian secara kelembagaan: Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota dan/atau ibu kota daerah setingkat provinsi, dan wilayah hukumnya termasuk Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
- b) Pengertian secara organisasional: Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan wilayah hukumnya yang terdiri dari Pengadilan Militer I-07 Balikpapan itu sendiri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Kepala Pengadilan), Kelompok Hakim Militer, Panitera, Sekretaris beserta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berada dibawah Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Adapun makna perkata dari visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut adalah:

1. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah lembaga Peradilan dilingkungan badan Peradilan Militer tingkat pertama yang

berkedudukan di Balikpapan yang wilayah hukumnya meliputi Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

2. Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadilan Militer I - 07 Balikpapan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu sampai tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
- e. Peningkatan kualitas pengawasan
- f. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para

pencari keadilan atas Pelayanan Hukum, dan sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam kerja, maka Pengadilan Militer I - 07 Balikpapan mempunyai **motto** yaitu: **“RADJA”**

R : Responsif

A : Akuntabel

D : Displin

J : Jujur

A : Adil

Dengan Semboyan “Pelayanan Terdepan Kinerja Maksimal”

Budaya kerja dengan nilai-nilai BerAkhlak yang diantaranya:

1. Malu datang terlambat;
2. Malu pulang lebih awal;
3. Malu tidak disiplin;
4. Malu berkata tidak jujur;
5. Malu sering ijin;
6. Malu meninggalkan kantor lebih awal;
7. Malu berlaku tidak sopan;
8. Malu tidak melaksanakan tugas dengan baik dan tidak bertanggung jawab;
9. Malu berpenampilan tidak rapih;
10. Malu tidak bekerjasama.

Dengan penerapan 8 Nilai Utama Mahakamah Agung RI:

1. Kemandirian
2. Integritas
3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas

6. Keterbukaan
7. Ketidakberpihakan
8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan Sasaran strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sehingga dapat mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, dimana setiap tujuan dan sasaran strategis tersebut telah ditetapkan indikator kinerja yang terukur.

1. Tujuan Strategis.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Tujuan strategis yang termuat di dalam rencana strategis adalah sebagai berikut:

- a. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- b. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan.

2. Sasaran Strategis.

Sebagaimana telah dijelaskan, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Untuk mencapai arah sebagaimana yang dikemukakan di atas, perlu adanya bentuk

pembangunan di bidang hukum dalam suatu perencanaan strategis di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang lebih terfokus pada pelaksanaan tugas pokoknya (teknis yudisial) yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara kejahatan dan pelanggaran pada tingkat pertama terhadap anggota militer berpangkat Kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana di wilayah hukumnya.

Sesuai tuntutan dan perkembangan zaman, problematika hukum masyarakat pencari keadilan semakin hari semakin kompleks, semakin tinggi kualitas maupun kuantitasnya, karena itu perlu adanya upaya langkah strategi dalam kerangka pengadilan yang unggul (the framework of courts excellence) dengan memperhitungkan setiap unsur (variable) yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Renstra Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan tiga langkah penting yaitu:

a. Perencanaan Strategis

Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan yaitu Strategi dirancang melalui analisis lingkungan internal dan eksternal, dengan mempertimbangkan nilai luhur sebagai berikut:

- 1) Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Berperilaku Adil
- 3) Berperilaku jujur
- 4) Berperilaku Bijaksana
- 5) Bertanggung Jawab
- 6) Menjunjung tinggi Harga diri

- 7) Berintegritas Tinggi
- 8) Berdisiplin Tinggi
- 9) Berperilaku Rendah Hati
- 10) Bersikap Mandiri
- 11) Bersikap Profesional

Ada 3 (tiga) sasaran strategis yang menjadi prioritas Reviu Rencana Strategis 2020 – 2024, adapun sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
- 2) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
- 3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara **Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama** selama tahun 2022-2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut ini :

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1.1 Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu
		1.2 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
		1.3 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		1.4 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2.1 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Setiap pencari keadilan dapat menjangkau adan peradilan untuk mencari keadilan	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	3.1 Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
--	--	--

b. Penetapan Tujuan

Sesuai dengan Visi dan Misi, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan harus dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya tertib administrasi peradilan dalam melaksanakan TUPOKSI.
- 2) Terwujudnya aparaturnya peradilan yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi.
- 3) Terwujudnya pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dengan efektif, efisien dan berkualitas.
- 4) Terwujudnya administrasi Kesekretariatan yang dapat mendukung TUPOKSI Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

c. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Ketiga sasaran tersebut di atas merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam tahun 2020–2024. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengusulkan program yang dituangkan di dalam DIPA sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara
Program pada DIPA 05 Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan untuk

mencapai sasaran strategis yaitu terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan serta meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Indikator Kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyelesaian perkara yang tepat waktu dan Pelaksanaan Sidang Keliling

- 2) Program Dukungan Manajemen Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
Merupakan program DIPA 01 Badan Urusan Administrasi yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis peningkatan kualitas pengawasan, peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Indikator Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a) Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
 - b) Gaji dan Tunjangan
 - c) Operasional dan Pemeliharaan Kantor
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Perkantoran.

Merupakan program pada DIPA 01 Badan Urusan Administrasi yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis peningkatan kualitas pengawasan, peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset. Indikator Kegiatan yang dilaksanakan adalah adanya pengadaan alat pengolah data dan komunikasi.

Untuk mendukung program-program tersebut terdapat beberapa kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada Tahun Anggaran 2022 yaitu:

- a) Peningkatan Manajemen Peradilan Militer
- b) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
- c) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

D. Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan RPJM 2020–2024. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja ada pada Rencana Strategis 2020 – 2024 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Adapun Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan	Panitera	Laporan Bulanan dan

		Upaya Hukum Banding	upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan		Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	Penilaian kepuasan dari para stakeholder	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Perbandingan antara jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu dengan jumlah putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

E. *Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022*

Rencana Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2022 memuat angka target kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target

kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2022. Selain itu, dokumen rencana kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi atau lebih dikenal sebagai perjanjian kinerja. Berikut Rencana kinerja Tahunan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2022.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90 %
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %
		d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%

F. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Penetapan Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja dibuat berdasarkan pada instruksi presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Adapun

tujuan adanya penetapan kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan serta pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Penetapan Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan RPJM 2020–2024. Adapun penetapan kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	95 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %
		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95 %

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN		
NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	97,64 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	100 %

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2022 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Pencapaian kinerja pada sasaran strategis I Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada tahun 2022 sebesar **97,64 %**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis I tersebut tergambar pada tabel capaian kinerja berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS I			
	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	95 %	93,55 %	98,48 %
2.	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	90 %	85,71 %	95,23 %
3.	Presentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	90 %	82,25 %	91,39 %
4.	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	95 %	99,76 %	105 %
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS I : 97,64 %				

Pencapaian kinerja pada sasaran strategis II Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2022 sebesar **100%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis II tersebut tergambar pada tabel capaian kinerja berikut:

O	SASARAN STRATEGIS II			
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100 %	100 %	100 %
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS II : 100 %				

Pencapaian kinerja pada sasaran strategis III Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan pada tahun 2022 sebesar **100%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis III tersebut tergambar pada tabel capaian kinerja berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS III			
	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan			
	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perakra yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	100 %	100 %	100 %
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS III : 100 %				

Adapun Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

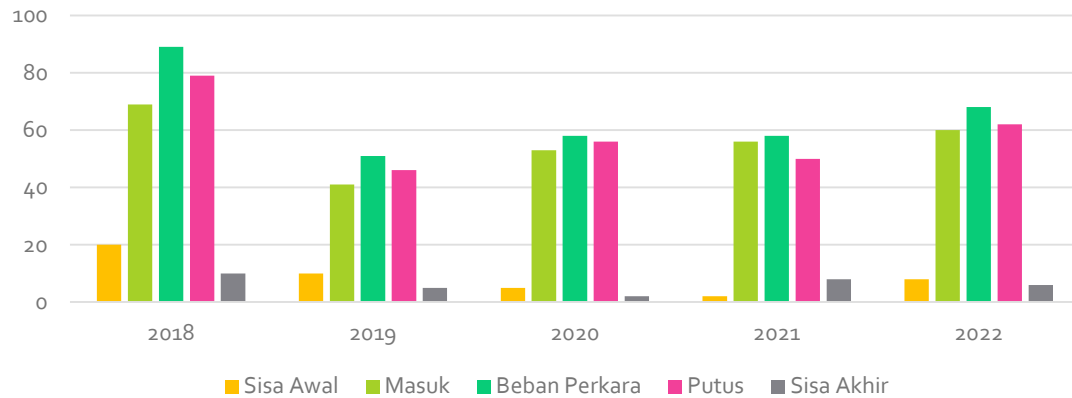
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %	93,55 %	98,48 %
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90 %	85,71 %	95,23 %

		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %	82,25 %	91,39 %
		d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	95 %	99,76 %	105 %
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	100 %	100 %	100 %

***Perbandingan Keadaan Perkara Kejahatan
Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 DAN 2022***

Tahun	Sisa Awal	Masuk	Beban Perkara	Putus	Sisa Akhir	Keterangan
2018	20	69	89	79	10	
2019	10	41	51	46	5	
2020	5	53	58	56	2	
2021	2	56	58	50	8	
2022	8	60	68	62	6	

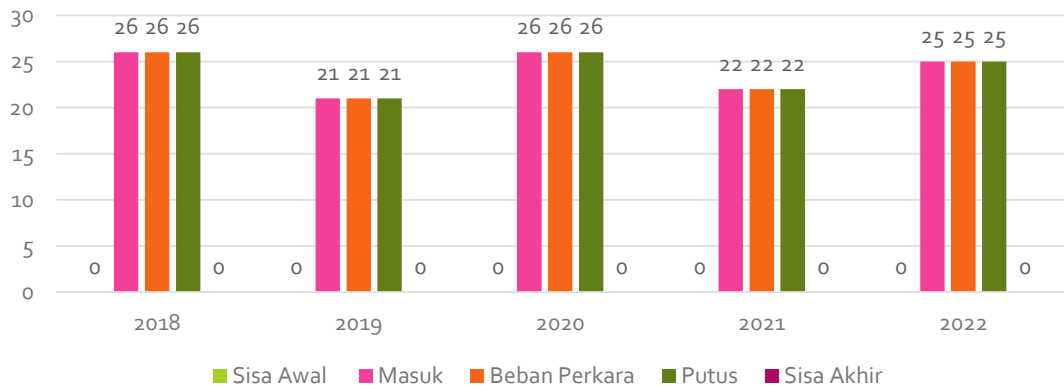
Grafik Perbandingan Keadaan Perkara Kejahatan Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022



Perbandingan Keadaan Perkara pelanggaran Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Tahun	Sisa Awal	Masuk	Beban Perkara	Putus	Sisa Akhir	Keterangan
2018	0	26	26	26	0	
2019	0	21	21	21	0	
2020	0	26	26	26	0	
2021	0	22	22	22	0	
2022	0	25	25	25	0	

Grafik Perbandingan Keadaan Perkara pelanggaran Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022



Analisis Akuntabilitas Kinerja.

Pengukuran kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2022 mengacu pada Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dengan 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai. Ketiga sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 6 (enam) indikator kinerja Pada akhir tahun 2022, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik, sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan.

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

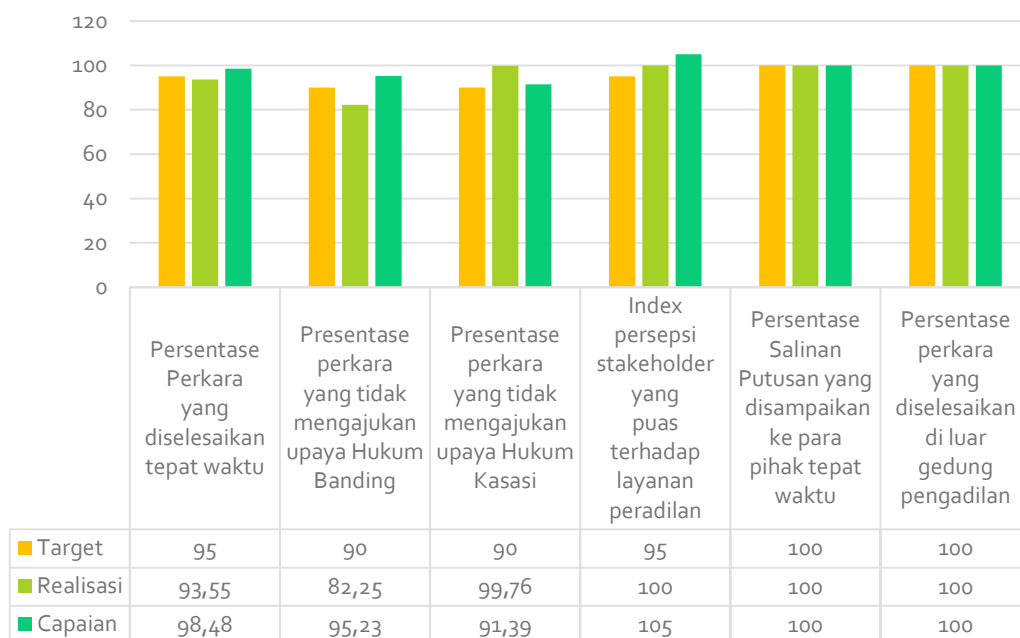
SASARAN 1

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan diukur dengan menetapkan 4 (empat) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran teknis yudisial ini, pada tahun 2022 dapat digambarkan pada tabel dan grafik sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	95	93,55	98,48
2.	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	90	85,71	95,23
3.	Presentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	90	82,25	91,39
4.	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	95	99,76	105
5.	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	100	100	100

GRAFIK SASARAN TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL TAHUN 2022



Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

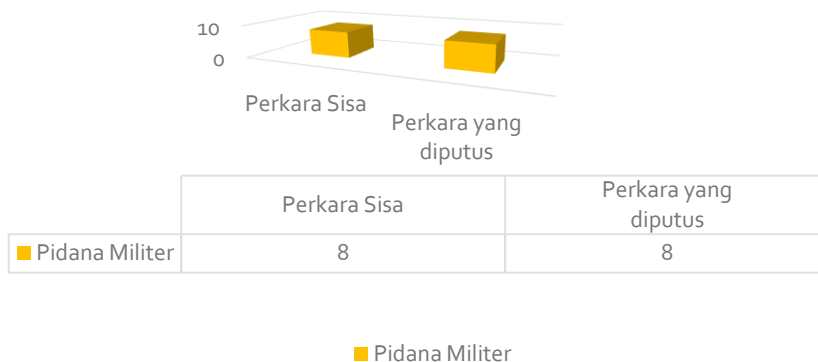
a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022.

Tingkat capaian indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 memenuhi target tahunan. Terkait indikator tersebut dapat dijelaskan bahwa pada Laporan Tahunan Perkara Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2022, sisa perkara pidana militer tahun 2021 sebanyak 8 (delapan) perkara. Sehingga terdapat sisa perkara pidana militer tahun 2021 yang diselesaikan pada tahun 2022. Dengan demikian pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan dapat terpenuhi dengan persentase 100% (seratus persen). Berikut tabel pencapaian target kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

TABEL PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %

GRAFIK PENYELESAIAN SISA PERKARA TAHUN 2021 DISELESAIKANTAHUN 2022



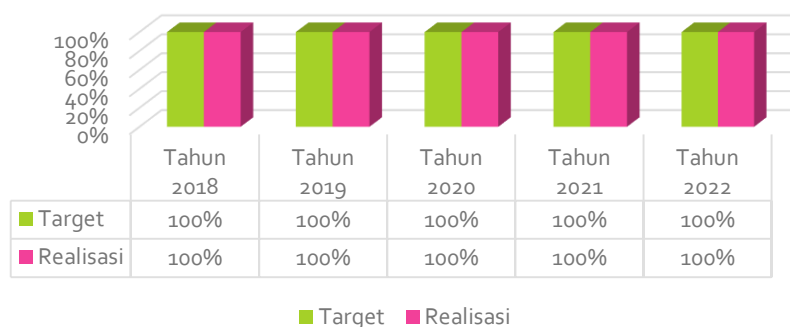
Berdasarkan tabel dan grafik di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan pada tahun 2022 dikategorikan terpenuhi dengan persentase 100% (seratus persen).

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan tahun 2022 berbanding sama dengan capaian indikator kinerja persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 sebagaimana tabel dan grafik sebagai berikut:

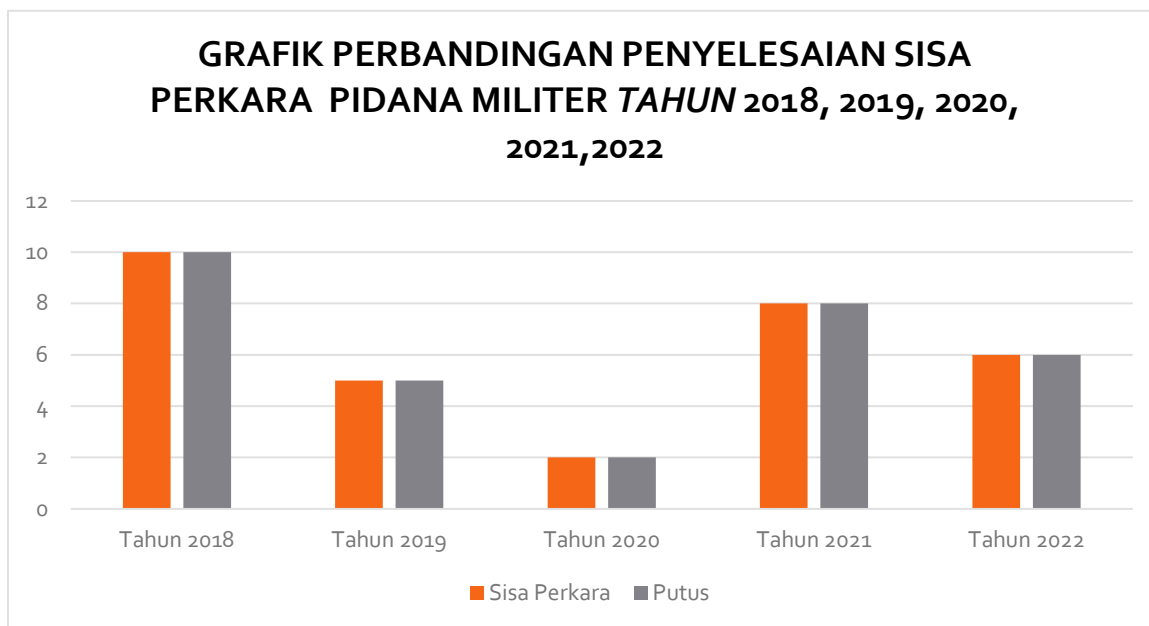
Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja										Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realisasi pencapaian target kinerja tahun 2022 terpenuhi

**GRAFIK PERBANDINGAN
PERSENTASE SISA PERKARA PIDANA MILITER
YANG DISELESAIKAN TAHUN, 2018, 2019, 2020,
2021, 2022**



**TABEL PERBANDINGAN PENYELESAIAN SISA PERKARA PIDANA MILITER
TAHUN 2018, 2019, 2020, 2021, 2022**

Grafik 0 s/d 10	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Sisa Perkara	10	5	2	8	6
Putus	10	5	2	8	6



- c. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja						Ket
	Realisasi					Target Jangka Menengah	
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan	100%	100%	100%	-	-	100%	Pencapaian target kinerja 2022 memenuhi target jangka menengah

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan pada tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis sudah tercapai. sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut:

d. Analisis keberhasilan atau peningkatan kinerja dan analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 dengan persentase 100% (seratus persen) merupakan perwujudan dari pelaksanaan kegiatan penyelesaian perkara tingkat pertama yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dan didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Peningkatan kinerja Hakim dan Panitera yang didukung oleh kinerja aparatur non teknis dalam penyelesaian perkara pada tahun berjalan.
2. Penyelesaian perkara yang tepat waktu didukung efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang dimanfaatkan secara optimal, keadaan jumlah majelis hakim disesuaikan dengan rasio penanganan perkara.
3. Disiplin kerja para aparatur atau Personel Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bagian merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

2. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lain Lintas Militer Yang Diselesaikan

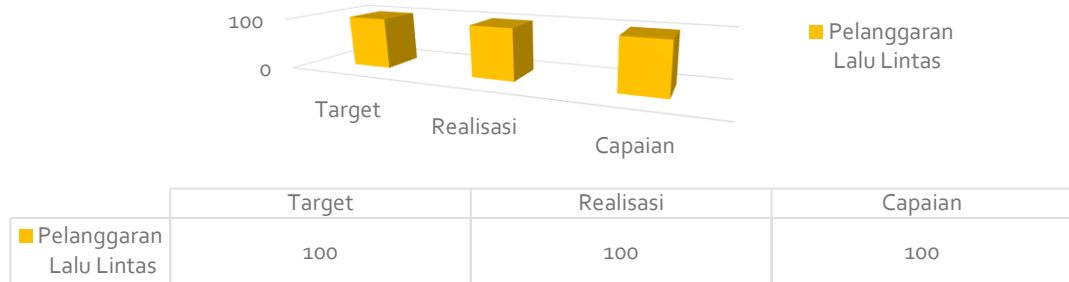
a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022.

Tingkat capaian indikator kinerja persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan pada tahun 2022 memenuhi target tahunan. Terkait indikator tersebut sebagaimana pada capaian indikator kinerja persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan pada tahun 2021 sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer tahun 2021 adalah 0 (nol) perkara (nihil). Sehingga tidak terdapat sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer pada tahun 2021 yang diselesaikan pada tahun 2022. Dengan demikian pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan dapat dikategorikan terpenuhi dengan persentase 100% (seratus persen). Pencapaian pada tahun 2021 penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas militer 100% (seratus persen) tanpa terdapat sisa perkara (nihil) pada tahun 2021 yang akan diselesaikan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa komitmen para personel Pengadilan Militer I-07 Balikpapan baik tenaga teknis dan non teknis peradilan terhadap percepatan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas militer yang tepat waktu.

TABEL PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %

GRAFIK PENYELESAIAN SISA PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS MILITER TAHUN 2021 DISELESAIKAN TAHUN 2022



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan pada tahun 2022 dikategorikan terpenuhi dengan persentase 100% (seratus persen). Tidak adanya sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer tahun 2021 yang diselesaikan pada tahun 2022 dikarenakan sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer tahun 2021 adalah 0 (nol) atau nihil.

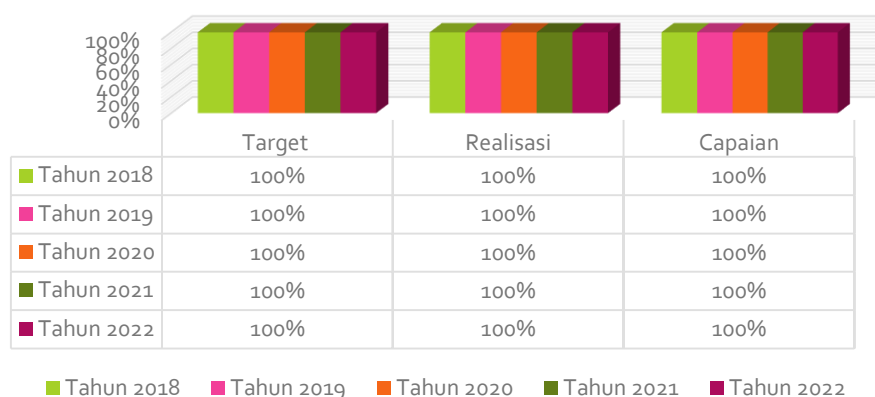
b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan berbanding sama dengan capaian indikator kinerja persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan pada tahun 2018, 019, 2020, 2021 dan 2022 sebagaimana tabel dan grafik sebagai berikut:

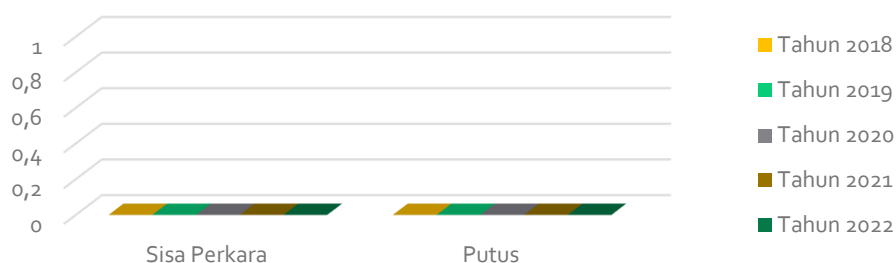
GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE SISA PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS MILITER YANG DISELESAIKAN TAHUN 2018,2019, 2020, 2021 DAN 2022

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja										Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase sisa perkara pelanggaran Lalu lintas militer yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realisasi pencapaian target kinerja tahun 2021 terpenuhi dengan persentase 100%

GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE SISA PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS MILITER YANG DISELESAIKAN TAHUN 2018,2019, 2020, 2021 DAN 2022



GRAFIK PERBANDINGAN PENYELESAIAN SISA PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS MILITER YANG DISELESAIKAN TAHUN 2018,2019, 2020, 2021 DAN 2022



c. **Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan pada tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis sudah tercapai dan konsisten dengan capaian persentase realisasi 100% (seratus persen). sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja						Ket
	Realisasi					Target Jangka Menengah	
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan	100%	100%	100%	-	-	100%	Pencapaian target kinerja 2022 memenuhi target jangka menengah

d. **Analisis keberhasilan atau peningkatan kinerja dan analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya.**

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 dengan persentase 100% (seratus persen) merupakan perwujudan dari pelaksanaan kegiatan penyelesaian perkara tingkat pertama yang tepat waktu, dan didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Peningkatan kinerja Hakim dan Panitera yang didukung oleh kinerja aparatur non teknis dalam penyelesaian perkara pada tahun berjalan.

2. Penyelesaian perkara yang tepat waktu didukung efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang dimanfaatkan secara optimal, keadaan jumlah Majelis Hakim disesuaikan dengan rasio penanganan perkara.

3. Disiplin kerja para aparaturnya atau Personel Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bagian merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

3. Persentase Perkara Pidana Militer yang diselesaikan Tepat Waktu.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022.

Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 belum memenuhi target. Pada tahun 2022 jumlah perkara yang ditangani sebanyak 68 (enam puluh delapan) perkara dan diputus sebanyak 62 (enam puluh dua) perkara. Sehingga sisa perkara tahun 2022 adalah sebanyak 6 (enam) Perkara. Tabel data keadaan perkara pada tahun 2022 sebagai berikut:

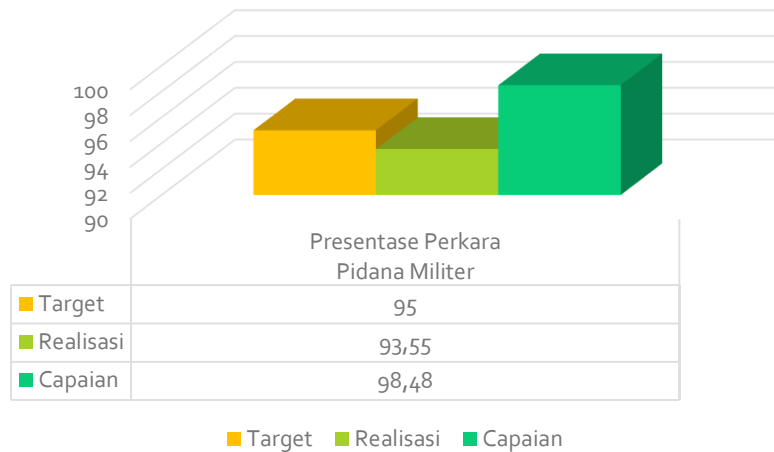
KEADAAN PERKARA PIDANA MILITER TAHUN 2022

Sumber: Laporan Perkar tahun	Bulan	Sisa Awal	Masuk	Putus	Sisa Akhir	2022
	Januari	8	10	0	18	
	Februari	18	1	1	18	
	Maret	18	5	8	15	
	April	15	13	6	22	
	Mei	22	0	8	14	
	Juni	14	7	9	12	
	Juli	12	1	3	10	
	Agustus	10	5	6	9	
	September	9	7	6	10	
	Oktober	10	1	2	9	
	November	9	5	8	6	
	Desember	6	5	5	6	
Jumlah			60	62		

Target penyelesaian perkara sebesar 95% (Sembilan puluh lima persen) pada tahun 2022 belum terpenuhi, dengan Jumlah sisa perkara pidana militer tahun 2021 adalah 8 (delapan) perkara, sedangkan jumlah perkara masuk tahun 2022 berjumlah 60 (enam puluh) perkara, sehingga jumlah perkara pidana militer yang ditangani pada tahun 2022 adalah berjumlah 68 (enam puluh delapan) perkara dan perkara pidana militer yang diputus sejumlah 62 (enam puluh dua) perkara. Sehingga sisa perkara tahun 2022 adalah sebanyak 6 (enam) Perkara. Dengan demikian persentase realisasi penyelesaian perkara tahun 2022 belum mencapai 100% (seratus persen). Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 terpenuhi sesuai target tahunan dengan persentase 95 % (Sembilan puluh lima persen). Berikut tabel dan grafik pencapaian target kinerjanya tahun 2022 sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	95	93,55	98,48

GRAFIK PERSENTASE PERKARA PIDANA MILITER YANG DISELAISKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2022



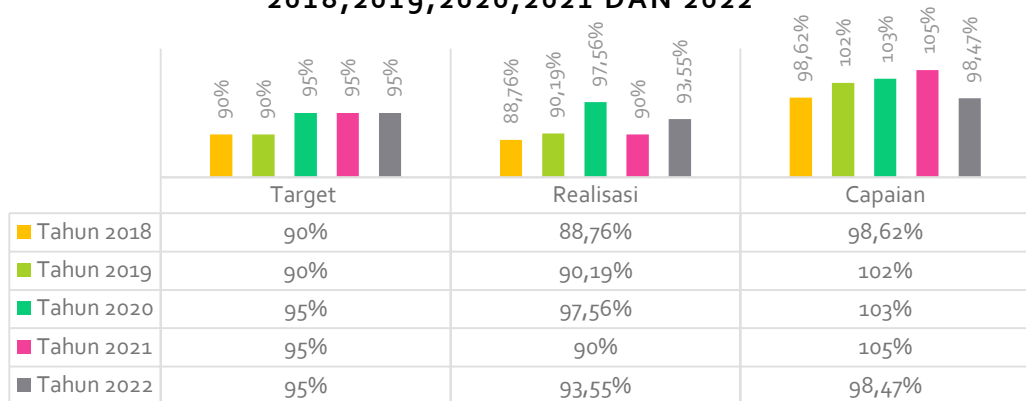
Berdasarkan data dan penjelasan tersebut di atas, target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 belum tercapai dengan persentase 100% (seratus persen). Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 terpenuhi sesuai target tahunan dengan persentase 95 % (Sembilan puluh lima persen). Berikut tabel dan grafik pencapaian target kinerjanya tahun 2022 sebagai berikut:

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

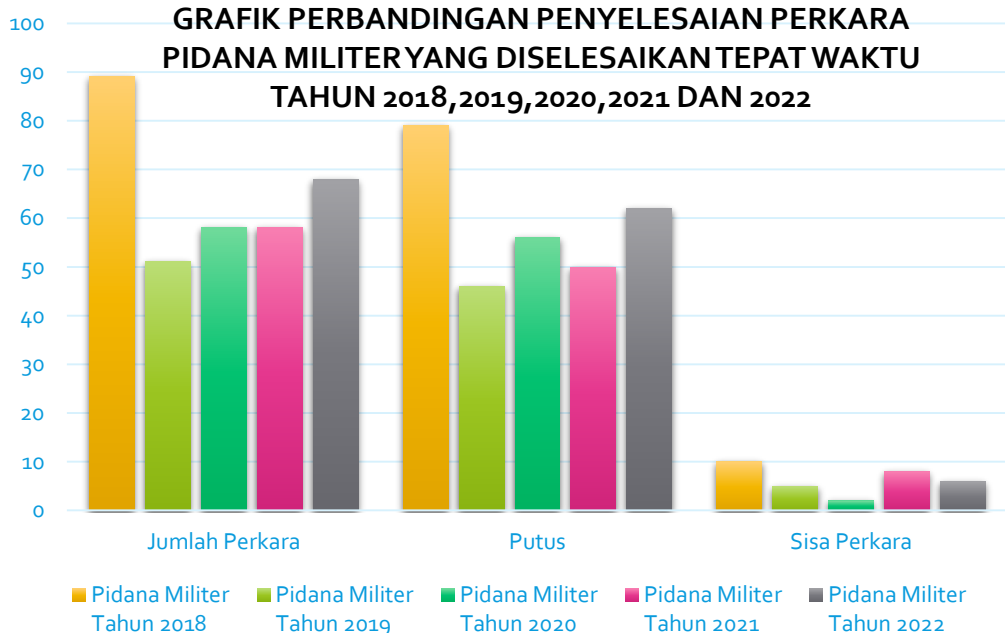
Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 berbanding tidak sama dengan capaian indikator kinerja persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022, berikut perbandingan sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja										Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase Perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu	90%	88,76%	90%	90,19%	95%	97,56%	95%	90%	95%	93,55%	Pencapaian kinerja belum memenuhi target 95%

**GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MILITER YANG
DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN
2018,2019,2020,2021 DAN 2022**



**GRAFIK PERBANDINGAN PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA MILITER YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU
TAHUN 2018,2019,2020,2021 DAN 2022**



c. **Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis berbanding tidak sama dimana target tercapai belum terpenuhinya target jangka menengah yang telah ditetapkan. Adapun perbandingan capaian realisasi persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja						Ket
	Realisasi					Target Jangka Menengah	
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu	88,76%	90,19%	93,55%	-	-	95%	Pencapaian target kinerja 2022 belum memenuhi target jangka menengah

d. **Analisis keberhasilan atau peningkatan kinerja dan analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya.**

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 belum tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, realisasi pencapaian kinerja tahun 2022 belum memenuhi target jangka menengah sebesar 95% (Sembilan puluh lima persen). Sebagai tolak ukur pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 penyelesaian perkara belum mencapai 100% (seratus persen), Capaian pada indikator kinerja persentase perkara pidana militer yang diselesaikan

tepat waktu tidak terlepas dari kinerja Hakim dan Panitera serta Aparatur Teknis dan Non Teknis yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai SOP dan selalu berpegang pada peraturan yang berlaku. Di lihat dari ketersediaan sumber daya manusia dibidang Teknis pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2022 hanya terdiri dari 4 (empat) Hakim Militer **termasuk Kadilmil dan Waka Dilmil**, untuk jabatan di kepaniteraan terdiri dari 1 (satu) orang Panitera berpangkat Mayor dan 1 (satu) orang Panmud Pidana, sedangkan Panmud Hukum masih kosong. Namun demikian strategi percepatan penyelesaian perkara dengan sumber daya manusia (Hakim dan Panitera) yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga target kinerja penyelesaian perkara yang tepat waktu dapat terlaksana dengan baik. Disiplin kerja para aparaturnya atau Personel Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bagian merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

4. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan Tepat Waktu.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022.

Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 telah memenuhi target. Pada tahun 2022 jumlah perkara pelanggaran lalu lintas yang ditangani berjumlah 25 (dua puluh lima) perkara dan telah diputus sebanyak 25 (dua puluh lima) perkara. Sehingga sisa perkara pada tahun 2022 adalah 0 (nol) perkara atau nihil. Target penyelesaian perkara persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang

diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 terpenuhi sebesar 100% (seratus persen). Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 telah terpenuhi. Berikut tabel dan grafik pencapaian target kinerjanya tahun 2022 sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%

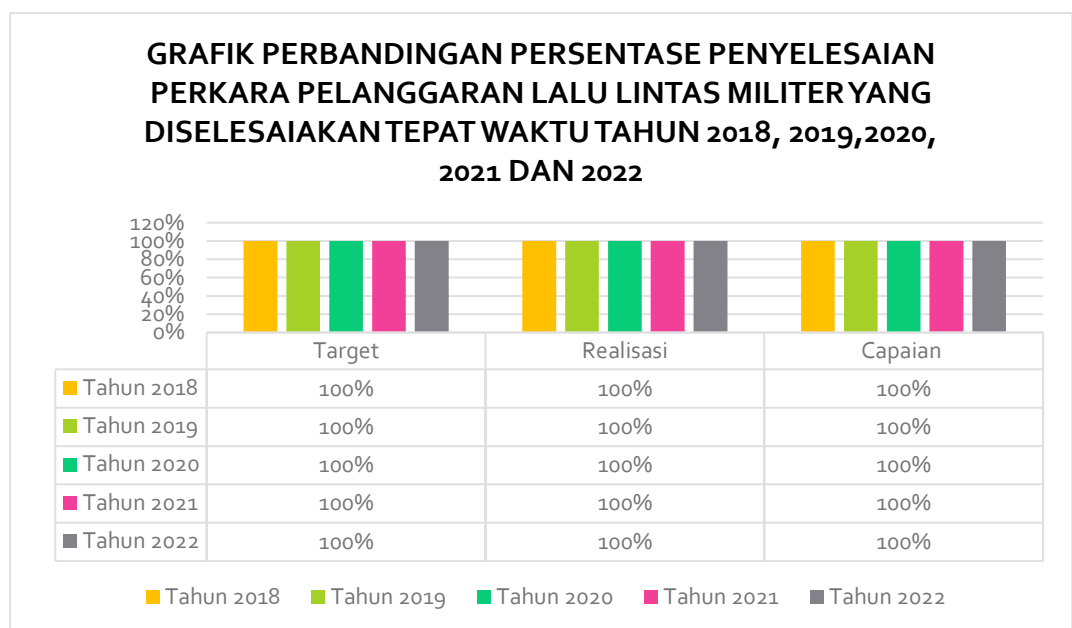


Berdasarkan data dan penjelasan tersebut di atas, target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 tercapai sebesar 100% (seratus persen).

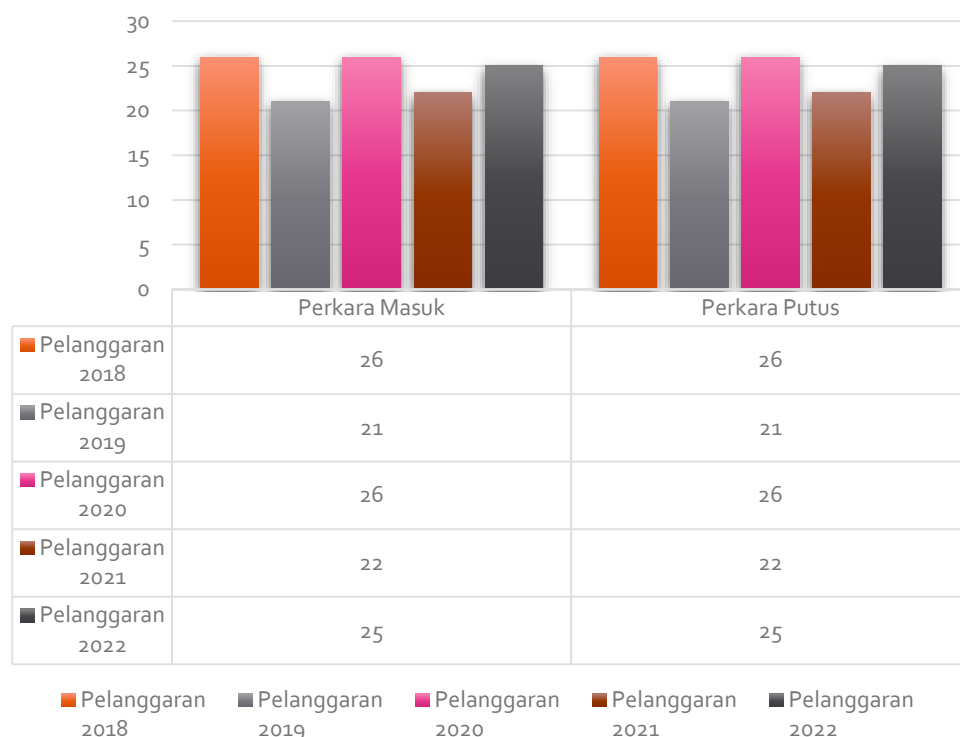
- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 berbanding sama jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya dengan persentase pencapaian 100% (seratus persen). Berikut perbandingan pencapaian target kinerja persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja										Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<i>tetap</i>



**GRAFIK PERBANDINGAN PENYELESAIAN
PERKARA PELANGGARAN LALULINTAS MILITER
YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN
2018, 2019, 2020, 2021 DAN 2022**



- c. **Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis dapat tercapai dan terpenuhinya target jangka menengah yang telah ditetapkan. Adapun perbandingan capaian realisasi persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang

diselasaikan tepat waktu pada tahun 2022 dengan target jangka menengah adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja						Ket
	Realisasi					Target Jangka Menengah	
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	-	-		Pencapaian target kinerja 2022 memenuhi target jangka menengah

Capaian realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan bahkan realisasi pencapaian kinerja tahun 2022 telah memenuhi target jangka menengah sebesar 100% (seratus persen). Persentase target jangka menengah tersebut realistis dengan mempertimbangkan percepatan dan batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Dengan dasar tersebut penyelesaian perkara pada tahun 2022 telah memenuhi target jangka menengah dengan persentase 100% penyelesaian perkara.

d. Analisis keberhasilan atau peningkatan kinerja dan analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Keberhasilan capaian target pada indikator kinerja persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu tidak terlepas dari kinerja Hakim dan Panitera serta Aparatur Teknis dan Non Teknis yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai SOP dan selalu berpegang pada peraturan yang berlaku. Dengan demikian

pelaksanaan target kinerja penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas militer yang tepat waktu dapat terlaksana dengan baik sesuai target kinerja tahunan bahkan persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu bisa memenuhi target kinerja tahunan dan mampu mencapai dan memenuhi target jangka menengah yang telah ditetapkan.

5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022.

Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2022 telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh) persen. Realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2022 sebagai berikut:

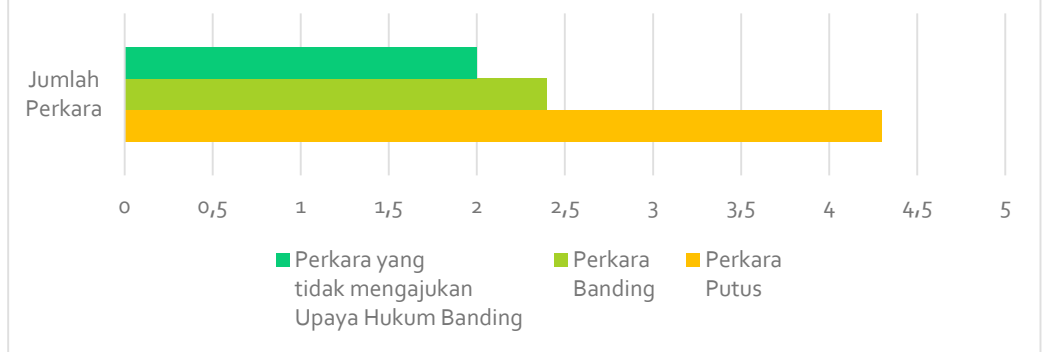
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%	85,71 %	95,23 %

TABEL PERKARA YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM DAN YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, TAHUN 2022

Perkara Putus	Perkara Banding	Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
87	14	73

Sumber Data: Laporan Tahunan 2022

GRAFIK PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING TAHUN 2022



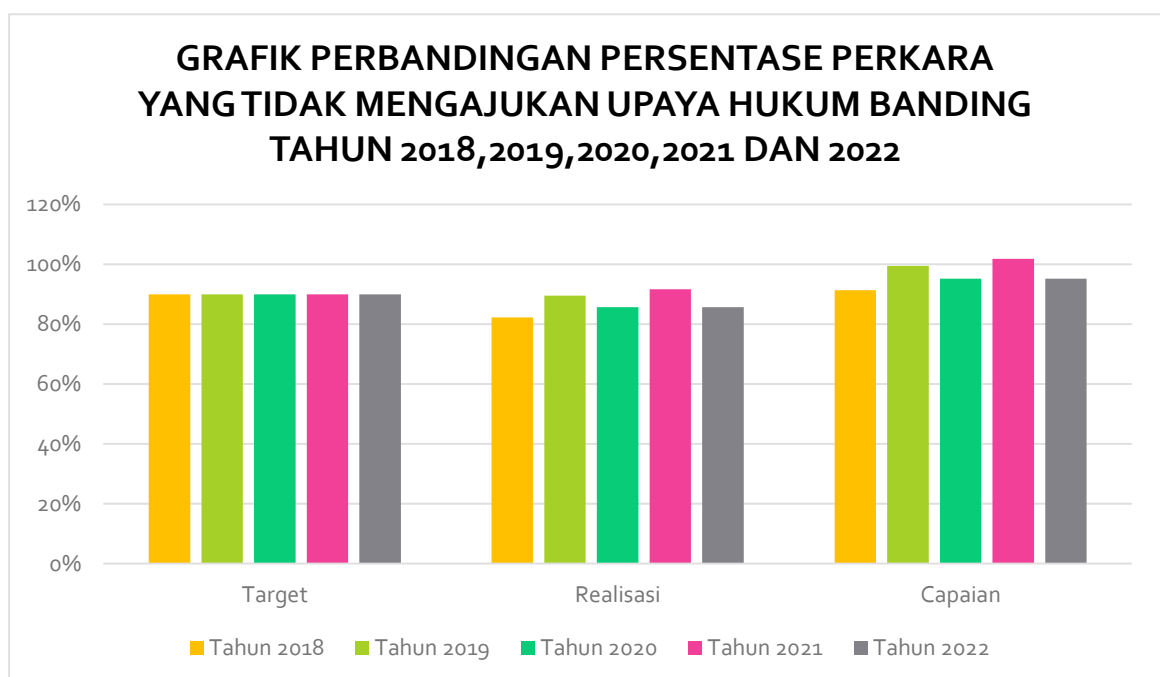
Pada tabel dan grafik Pengajuan Upaya Hukum Banding pada tahun 2022 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah perkara yang diputus pada tahun 2022 adalah sebanyak 87 perkara (delapan puluh tujuh) perkara, jumlah beban perkara pada tahun 2022 sebanyak 93 perkara (Sembilan puluh tiga) perkara, dari jumlah perkara yang diputus tersebut yang mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 14 (empat belas) perkara, sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 73 perkara (tujuh puluh tiga) perkara Dengan pencapaian target 85,71 % (delapan puluh lima koma tujuh puluh satu) persen.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lain dan beberapa tahun terakhir.

Jika dibandingkan dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2021, pencapaian target kinerja tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 5,97% (lima koma Sembilan puluh tujuh) persen, karena pencapaian target kinerja pada indikator kinerja

persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2021 sebesar 91,68 % (sembilan puluh satu koma enam puluh delapan) persen, salah satu faktor penurunan persentase tersebut karena adanya peningkatan jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2022 berjumlah 86% (delapan puluh enam) persen dibandingkan perkara yang ditangani pada tahun 2021. Sedangkan perbandingan pencapaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja										Ket.
	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	90%	82,27 %	90%	89,55 %	90 %	85,71 %	90%	91,68 %	90%	85,71 %	Pencapaian target kinerja turun 5,97%



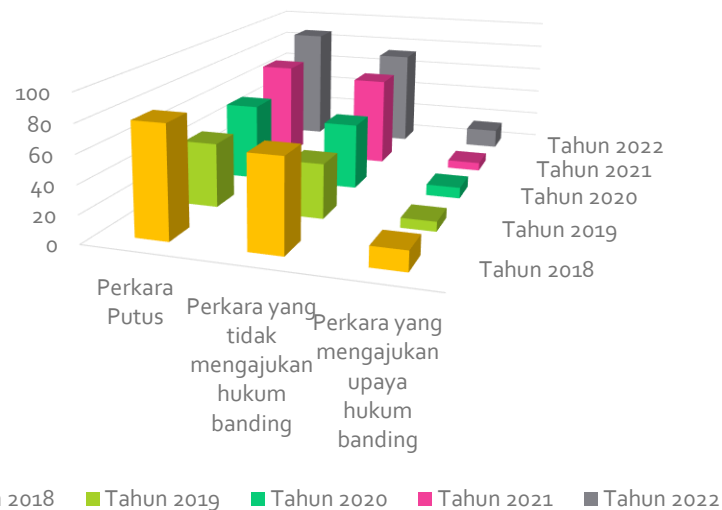
Grafik 0 s/d 110%	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
<i>Target</i>	90%	90%	90%	90%	90%
<i>Realisasi</i>	82,27%	89,55%	85,71%	91,68%	85,71%
<i>Capaian</i>	91,41%	99,5%	95,23%	101,87 %	95,23%

**TABEL PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING
TAHUN 2018,2019,2020,2021 DAN 2022**

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding
2018	79 Perkara	14 Perkara	65 Perkara
2019	46 Perkara	7 Perkara	39 Perkara
2020	56 Perkara	8 Perkara	48 Perkara
2021	72 Perkara	6 Perkara	66 Perkara
2022	87 Perkara	14 Perkara	73 Perkara

Sumber Data : Laporan Tahunan 2022

**GRAFIK PERBANDINGAN PERKARA YANG TIDAK
MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING
TAHUN 2018, 2019, 2020, 2021 DAN 2022**



Grafik 0 s/d 90%	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
<i>Perkara Putus</i>	79	46	56	72	87
<i>Perkara yang tidak mengajukan hukum banding</i>	65	39	48	66	73
<i>Perkara yang mengajukan upaya hukum banding</i>	14	7	8	6	14



Berdasarkan pada tabel dan grafik diatas bahwa realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2022 mengalami penurunan persentase pencapaian dibandingkan tahun 2021, tetapi mengalami peningkatan di bandingkan pencapaian target pada tahun 2018 dan pada tahun 2020 pencapaian target tetap sama dengan tahun 2022. Terlihat pada tabel dan grafik diatas bahwa pada tahun 2022 dari 87 (tujuh puluh dua) perkara putus terdapat 14 (empat belas) perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, terlihat bahwa dari sisi jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2022 mengalami kenaikan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding "Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka menunjukkan semakin puas atas putusan Pengadilan". Dari uraian diatas dapat dijelaskan pula bahwa pada tahun 2022 perkara yang mengajukan upaya hukum Banding terdiri

dari 1 (satu) perkara pembunuhan berencana, 1 (satu) perkara zina, 1 (satu) perkara Illegalloging, 3 (tiga) perkara Narkotika, 2 (dua) perkara penadahan, 2 (dua) perkara Desersi, 2 (dua) perkara Asusila, 1 (satu) perlindungan anak dan 1 (satu) perkara Penganiayaan. Dari 14 (empat belas) perkara yang mengajukan upaya hukum Banding tersebut 6 (enam) perkara yakni perkara pembunuhan berencana, perkara kejahatan kesusilaan, perkara narkotika, perkara perlindungan anak, di putus dipecat dari dinas militer. Oleh karenanya baik Terdakwa maupun Oditur Militer memiliki hak dan menggunakan hak mereka tersebut untuk mengajukan permohonan upaya hukum Banding untuk mendapatkan keadilan sebagaimana telah diatur dalam KUHAP. Majelis Hakim tingkat pertama telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memutus perkara dengan seadiladilnya, akan tetapi rasa keadilan tersebut sangat subjektif bagi para pihak yang berperkara sehingga Upaya Hukum Banding merupakan jalan yang dijamin oleh undangundang untuk menguji putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, oleh karenanya upaya hukum banding merupakan hak bagi para pihak dalam hal ini Terdakwa dan Oditur Militer.

c. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja taliun 2022 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja						Ket
	Realisasi					Target Jangka Menengah	
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85,71%	91,68%	85,71%	-	-	90%	Kurang dari target persentase jangka menengah yang ditentukan sebesar 4,29%

Realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2022 belum mencapai target tahunan dan kurang dari target jangka menengah yang telah ditetapkan. Seperti sudah dijelaskan bahwa rasa keadilan tersebut sangat subjektif bagi para pihak yang berperkara sehingga Upaya Hukum Banding merupakan jalan yang dijamin oleh Undang-undang untuk menguji putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya Upaya Hukum Banding merupakan hak bagi para pihak dalam hal ini Terdakwa dan Oditur Militer yang tidak bisa dihindari. Pada tabel diatas terlihat bahwa capaian target kinerja pada tahun 2022 belum terpenuhi target kinerja jangka menengah dengan capaian 85,71% (delapan puluh lima koma tujuh puluh satu) persen dengan rincian perkara yang diputus 87 (delapan puluh tujuh) perkara, 73 (tujuh puluh tiga) perkara tidak melakukan upaya hukum Banding dan 14 (empat belas) perkara mengajukan upaya hukum Banding. Dari rincian tersebut terlihat target kinerja pada tahun 2022 belum mencapai persentase target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh) persen. Diupayakan bahwa capaian target kinerja jangka menengah akan dapat terpenuhi pada tahun berikutnya.

d. Analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Diperlukan peningkatan kinerja Aparatur Teknis Pengadilan Hakim dan Panitera untuk semakin menghasilkan produk putusan dan pelayanan yang berkualitas sehingga kepuasan para pencari keadilan terpenuhi.

Dengan demikian capaian target kinerja pada indikator persentase yang tidak melakukan upaya hukum Banding akan tercapai. Secara umum Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan pada tahun 2022 telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melayani pencari keadilan. Para Hakim dan Panitera sebagai tenaga teknis Pengadilan sudah berupaya secara maksimal untuk menghasilkan produk putusan berkualitas dan berkeadilan sesuai penerapan dalam KUHP dan KUHPM serta penerapan Hukum Acara Pidana Militer didalam persidangan sehingga terwujudkan pelayanan yang prima.

Akan tetapi upaya hukum merupakan hak Terdakwa dan Oditur Militer sehingga rasa keadilan dirasakan sangat subjektif, puas bagi pihak yang merasa putusan dirasa adil baginya dan tidak puas bagi pihak yang merasa putusan dirasa tidak adil bagi mereka sehingga mendorong salah satu pihak untuk melakukan upaya hukum Banding guna mendapatkan rasa keadilan tersebut.

Seluruh aparatur Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan memiliki komitmen yang kuat untuk terhindar dari perbuatan yang koruptif, berperilaku bersih dan melayani serta selalu menjaga integritas dalam setiap penyelesaian perkara baik Hakim, Panitera, Panitera Pengganti maupun oleh tenaga non teknis Pengadilan.

6. **Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.**

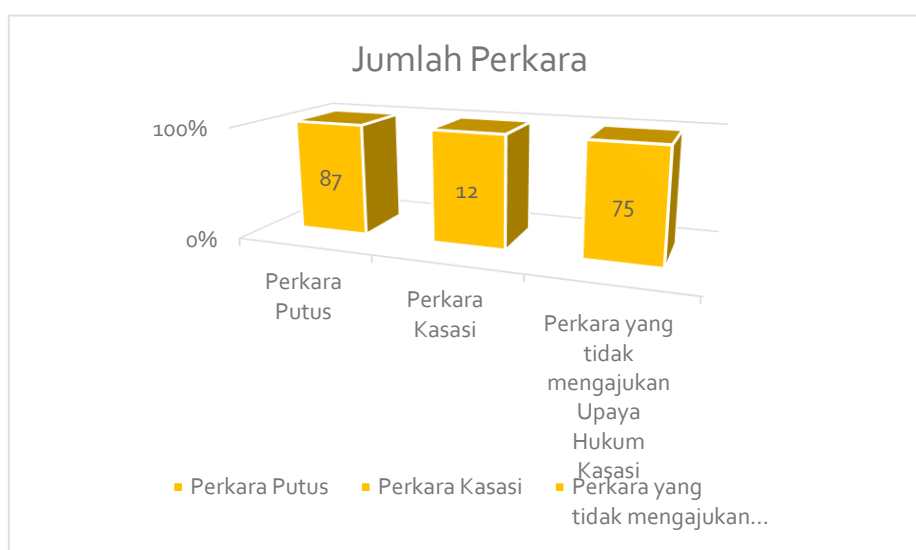
a. **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022.**

Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2022 belum memenuhi target sebesar 90% (sembilan puluh) persen. Realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel realisasi pencapaian target perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2022 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	82,25 %	91,39 %

TABEL PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI TAHUN 2022

Perkara Putus	Perkara Kasasi	Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
87	12	75



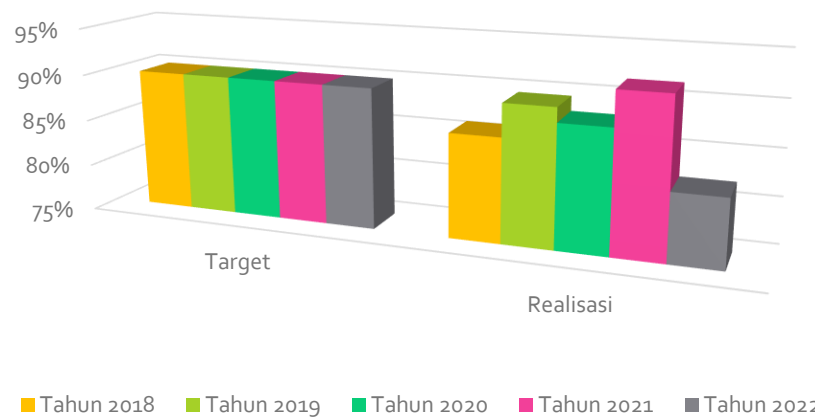
Pada tabel dan grafik Pengajuan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2022 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah perkara yang diputus pada tahun 2022 sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) perkara, jumlah tersebut yang mengajukan upaya Hukum Kasasi sebanyak 12 (dua belas) perkara, sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) perkara dengan Persentase pencapaian target 82,25% (delapan puluh dua koma dua puluh lima) persen.

c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Pencapaian target kinerja tahun 2022 jika dibandingkan dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 9,43% (Sembilan koma empat puluh tiga) persen, karena pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2021 sebesar 91,68% (sembilan puluh satu koma enam puluh delapan) persen. Sedangkan perbandingan pencapaian indikator kinerja pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja										Ket.	
	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	86,07%	90%	89,55%	90%	88%	90%	91,68%	90%	82,25 %	Pencapaian target kinerja menurun 9,43%	

GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI TAHUN 2018,2019,2020,2021 DAN 2022

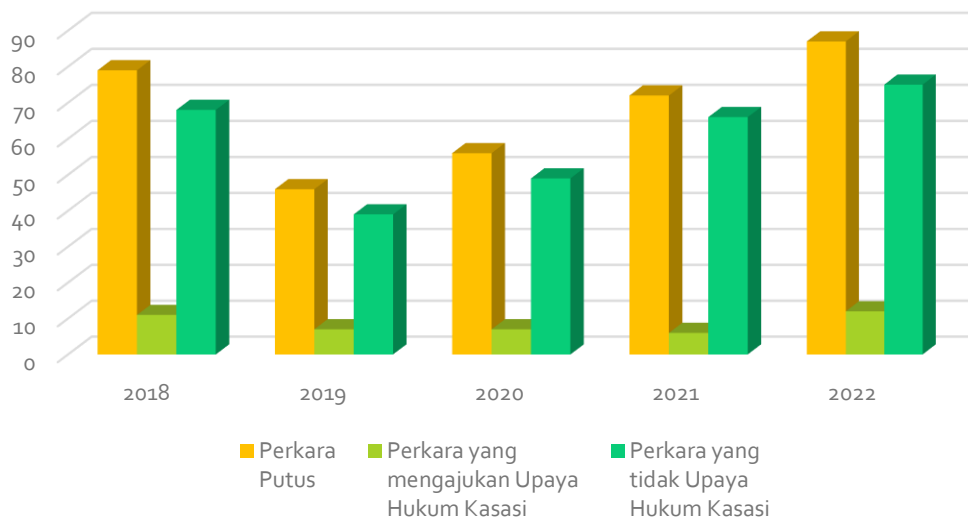


**TABEL PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN
UPAYA HUKUM KASASI TAHUN 2018,2019, 2020,2021 DAN 2022**

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perkara yang tidak Upaya Hukum Kasasi
2018	79 Perkara	11 Perkara	68 Perkara
2019	46 Perkara	7 Perkara	39 Perkara
2020	56 Perkara	7 Perkara	49 Perkara
2021	72 Perkara	6 Perkara	66 Perkara
2022	87 Perkara	12 Perkara	75 Perkara

Sumber Data: Laporan Tahunan 2022

**GRAFIK PERBANDINGAN PERKARA
YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM
KASASI
TAHUN 2018, 2019, 2020, 2021 DAN 2022**



**Rasio Perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum Kasasi tahun 2022**



Berdasarkan pada tabel dan grafik diatas bahwa realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan pencapaian target pada tahun

2018, 2019, 2020, dan 2021, realisasi target kinerja tahun 2022 dengan persentase 82,25% (delapan puluh koma dua puluh lima) persen. Dapat dilihat pada tabel dan grafik diatas bahwa pada tahun 2022 dari 87 (delapan puluh tujuh) perkara putus, terdapat 12 (dua belas) perkara yang mengajukan upaya Hukum Kasasi, jika dibandingkan pada tahun 2019, 2020, dan 2021 mengalami penurunan jumlah perkara yang mengajukan upaya Hukum Kasasi. "Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka menunjukkan semakin puas atas putusan Pengadilan". Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022 perkara yang mengajukan upaya Hukum Kasasi terdiri dari 12 (dua belas) perkara yaitu : 3 (tiga) perkara Narkotika, 1 (satu) perkara pembunuhan berencana, 1 (satu) perkara Zina, 1 (satu) perkara ilegalloging, 1 (satu) perkara desersi, 2 (dua) perkara penadahan, 2 (dua) perkara Asusila, 1 (satu) perkara asusila, 1 (satu) perkara asusila dibawah umur, kedua belas perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi tersebut diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusan menolak permohonan dari pemohon kasasi atau Terdakwa dan menguatkan putusan Tingkat Banding. Oleh karenanya baik Terdakwa maupun Oditur Militer memiliki hak dan menggunakan hak mereka tersebut untuk mengajukan permohonan upaya hukum kasasi untuk mendapatkan keadilan sebagaimana telah diatur dalam KUHAP.

- c. **Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2022. dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja						Ket
	Realisasi					Target Jangka Menengah	
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	88%	91,68%	82,25%	-	-	90%	Kurang dari target persentase jangka menengah yang ditentukan sebesar 4,29%

Realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi pada tahun 2022 belum mencapai target tahunan dan belum memenuhi target jangka menengah yang telah ditetapkan, realisasi pencapaian target pada tahun 2021 melebihi target tahunan yang telah ditetapkan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa rasa keadilan tersebut sangat subjektif bagi para pihak yang berperkara sehingga Upaya Hukum merupakan jalan yang dijamin oleh Undang-undang untuk menguji putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding tersebut, oleh karenanya Upaya Hukum Kasasi merupakan hak bagi para pihak dalam hal ini Terdakwa dan Oditur Militer sehingga tidak bisa dihindari. Pada tabel diatas terlihat bahwa capaian target kinerja pada tahun 2022 belum mencapai persentase target kinerja tahunan sebesar 90% (sembilan puluh) persen dengan capaian target kinerja tahun 2022 mencapai 82,25% (delapan puluh dua koma dua puluh lima) persen dengan rincian perkara yang diputus 87 (delapan puluh tujuh) perkara, 75 (tujuh puluh lima) perkara tidak

melakukan upaya Hukum Kasasi dan 12 (dua belas) perkara mengajukan upaya hukum kasasi.

Dari rincian tersebut terlihat target kinerja pada tahun 2022 belum mencapai persentase target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan sebesar 90% (Sembilan puluh) persen. Di upayakan bahwa capaian target kinerja jangka menengah akan dapat terpenuhi pada tahun berikutnya.

d. Analisis keberhasilan atau peningkatan kinerja dan analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Secara umum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2022 telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melayani pencari keadilan. Para Hakim dan Panitera sebagai tenaga teknis Pengadilan sudah berupaya secara maksimal untuk menghasilkan produk putusan berkualitas dan berkeadilan sesuai penerapan dalam KUHP dan KUHPM serta penerapan Hukum Acara Pidana didalam persidangan sehingga terwujudkan pelayanan yang prima dan berkeadilan. Akan tetapi upaya hukum merupakan hak Terdakwa dan Oditur Militer sehingga rasa keadilan dirasakan sangat subjektif, puas bagi pihak yang merasa putusan dirasa adil baginya dan tidak puas bagi pihak yang merasa putusan dirasa tidak adil bagi mereka sehingga mendorong salah satu pihak untuk melakukan upaya hukum guna mendapatkan rasa keadilan tersebut.

Bahwa seluruh aparaturnya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memiliki komitmen yang kuat untuk terhindar dari perbuatan yang koruptif, berprilaku bersih dan melayani serta selalu menjaga

integritas dalam setiap penyelesaian perkara baik Hakim, Panitera, Panitera Pengganti maupun oleh tenaga non teknis Pengadilan.

7. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.

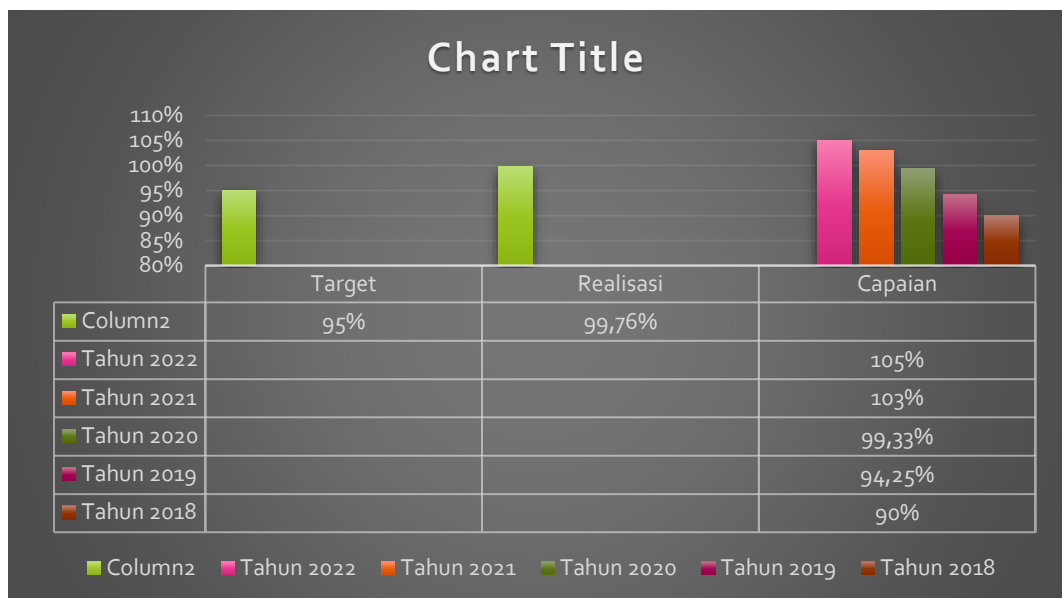
a. Index Kepuasan Pencari Keadilan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2022.

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan. Sedangkan perbandingan pencapaian indikator kinerja pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian				
Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	95%	99,76%	2022	2021	2020	2019	2018
			105%	103%	99,33%	94,25%	%

Grafik Perbandingan Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan



Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, yaitu:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberidan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

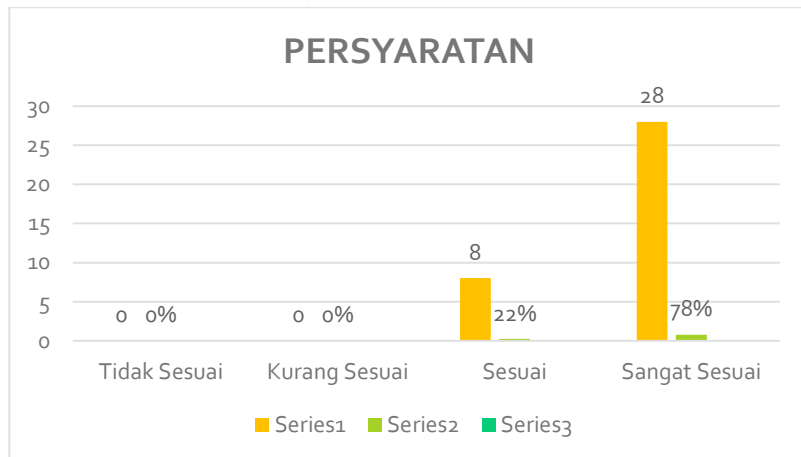
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

b. Hasil Survei dan Analisa data

Berdasarkan hasil analisis fakta di lapangan diperoleh Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersaji dalam data berikut ini:

1. Persyaratan

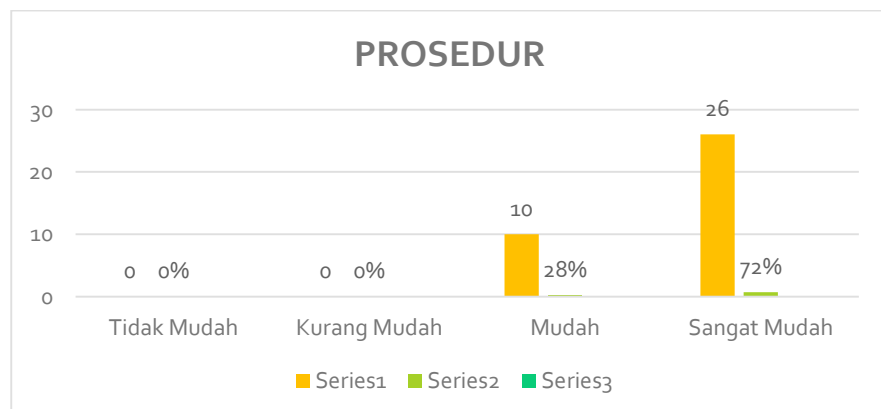
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrasi. Hasil analisis pada ruang persyaratan ini secara ringkas disajikan dalam tabel dan diagram berikut ini:



Dari diagram tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan persyaratan teknis maupun administrasi yang harus dipenuhi dalam hal penanganan kepentingan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan “sangat sesuai” sebanyak 28 Orang (78 %) dari 36 Responden.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Hasil analisis jawaban responden dalam ruang lingkup prosedur pelayanan secara ringkas disajikan dalam diagram berikut:



Dari diagram tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden 26 orang (72 %) dari 36 orang responden dengan menjawab sangat mudah.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menyiapkan sejumlah informasi dan petunjuk yang cukup memadai untuk menyampaikan prosedur pelayanan kepada masyarakat, Selain itu terdapat petugas di meja informasi yang selalu siap untuk memberikan keterangan.

Prosedur pelayanan yang dapat diberikan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan juga dapat diakses melalui jaringan internet, karena sudah ada Website dan Direktori Putusan dari Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan juga telah memiliki Humas yang bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan aktivitas pengadilan.

3. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Hasil analisis pada ruang lingkup waktu pelayanan secara ringkas disajikan dalam tabel dan diagram berikut:

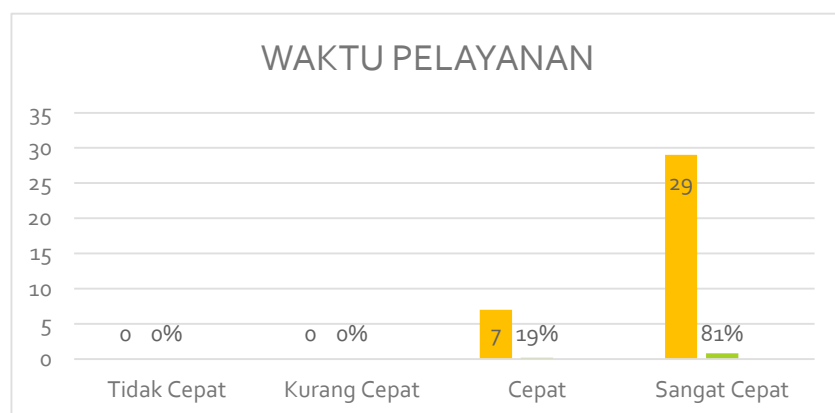


Diagram tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden 29 orang dari 36 responden (81%) menyatakan mengenai waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan seluruh proses dari kebutuhan pelayanan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah Sangat Cepat. Dengan demikian, seluruh warga Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada publik sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan secepat mungkin. Terhadap seluruh pegawai Pengadilan telah diperintahkan untuk membiasakan diri melakukan pelayanan secara maksimal dan sebaik mungkin kepada masyarakat.

4. Biaya / Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Hasil analisis pada ruang lingkup biaya atau tarif pelayanan secara ringkas disajikan dalam tabel dan diagram berikut:

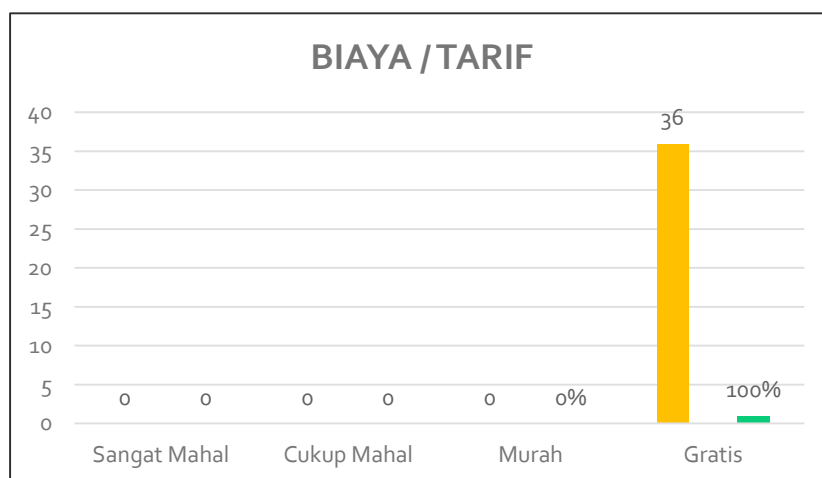


Diagram tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden 36 orang dari 36 orang responden dengan presentase (100 %) menyatakan biaya atau tarif yang dikenakan kepada penerima layanan dari penyelenggara/petugas di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah **gratis**.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan, Hasil analisis data tentang spesifikasi dan jenis pelayanan secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

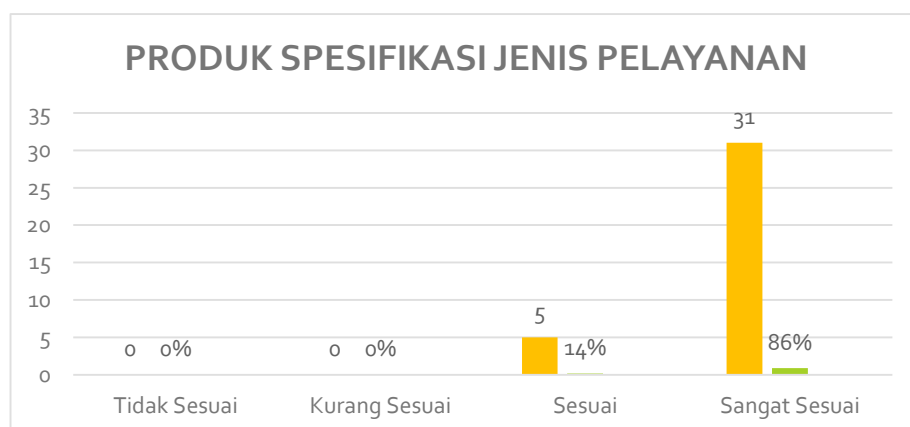
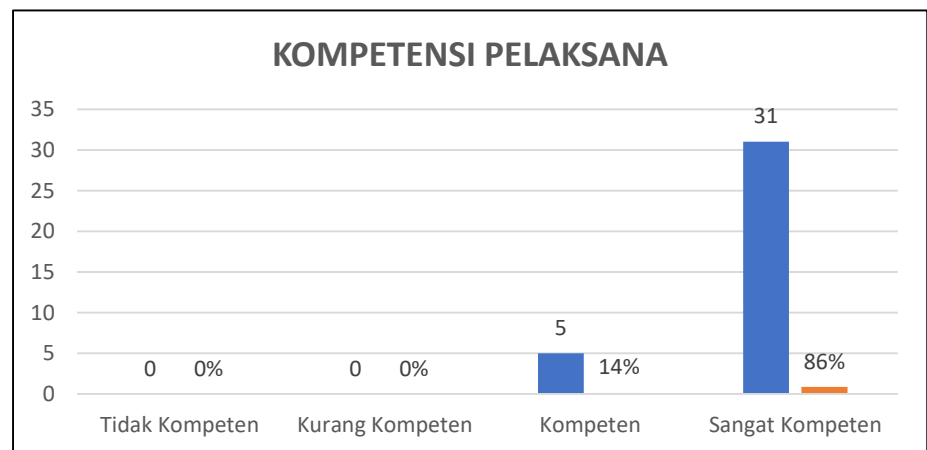


Diagram tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden 31 orang dari 36 orang (86 %) menyatakan hasil pelayanan yang diberikan dan diterima oleh penerima layanan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah sangat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan sebanyak 5 orang (14 %) mengatakan sesuai.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman. Hasil analisis data mengenai kompetensi pelaksana pelayanan, tersaji dalam tabel berikut:



Kompetensi (Pengetahuan, keahlian, Keterampilan dan pengalaman) petugas Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam memberikan pelayanan oleh 31 orang dari 36 responden dengan presentase (86 %) dinyatakan sangat kompeten dan 5 orang (14 %) menyatakan kompeten.

Secara umum produk pelayanan yang dihasilkan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sangatlah banyak dan beragam serta melibatkan banyak unit pelayanan. Masing - masing bagian tersebut memiliki staff yang bertanggung jawab untuk melayani masyarakat dan sejumlah tata laksana kerja serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus ditaati dan menjadi acuan Bersama. Pada umumnya staff yang bertugas di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, baik Hakim, Panitera

maupun para Staff telah memiliki pengalaman dan kemampuan yang sesuai dengan SOP.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan hasil analisis pada ruang lingkup perilaku pelaksana pelayanan secara ringkas disajikan dalam tabel dan berikut ini:

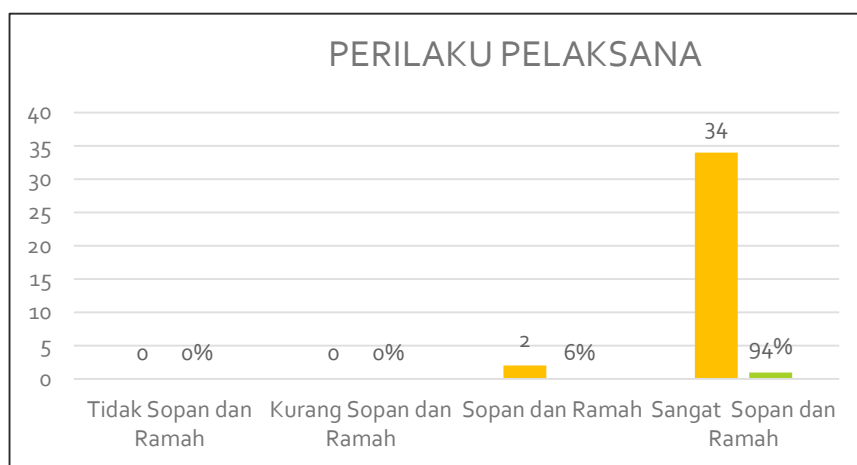


Diagram tersebut di atas menunjukkan bahwa responden yang menyatakan perilaku atau sikap petugas dalam memberikan layanan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang menyatakan sangat sopan dan ramah adalah 34 orang dari 36 responden (94 %).

Mengenai unsur perilaku petugas pelayanan ini tidak tergalil lebih dalam oleh tim survey, dalam arti perilaku petugas pelayanan yang manakah yang bermaksud sebagaimana diterangkan di muka, jenis pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sangat banyak dan beragam, bahkan termasuk Putusan Hakim juga merupakan hasil pelayanan dari Pengadilan Miliet I-07 Balikpapan.

8. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan dan proyek) Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer dan mesin) Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (Gedung) hasil analisis pada ruang lingkup disajikan dalam diagram berikut ini:

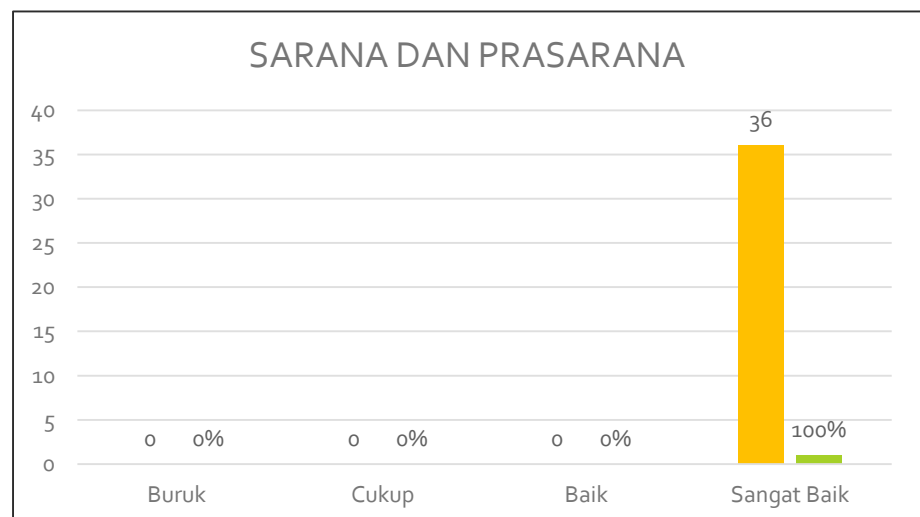


Diagram tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden 36 orang dari 36 orang responden dengan presentase (100 %) menyatakan petugas Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam memberikan layanan telah memenuhi kewajiban sebagai penyelenggara untuk sarana dan prasarana sangat baik dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut, Hasil analisis pada ruang lingkup secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

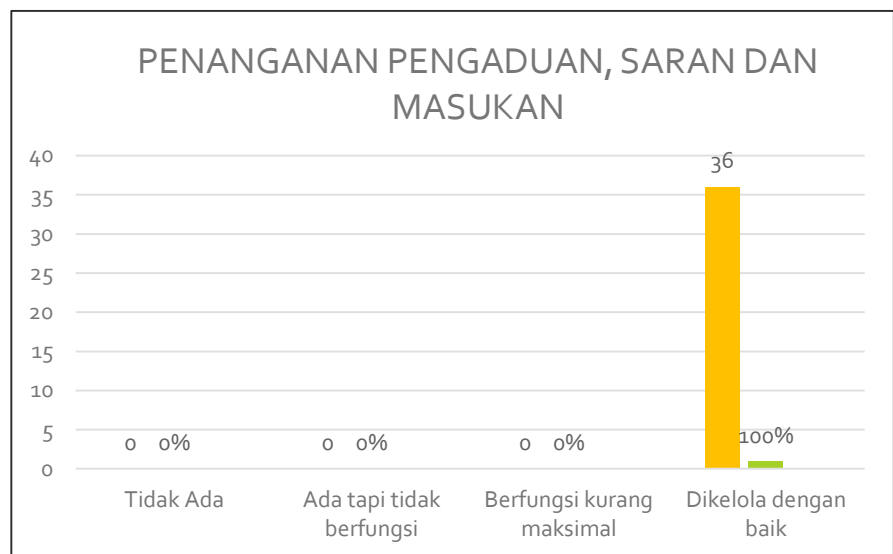


Diagram di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden 36 orang dari 36 orang responden dengan presentase (100 %) menyatakan penanganan pengaduan dan tindak lanjut dari pengaduan, saran dan masukan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah dikelola dengan baik.

a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata - Rata Unsur	Nilai Rata - Rata Tertimbang	Nilai IKM	Kategori	Kinerja
1	Persyaratan	3,778	0,11	0,416	A	Sangat Baik
2	Prosedur	3,722	0,11	0,409	A	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,806	0,11	0,419	A	Sangat Baik

4	Biaya / Tarif	3,972	0,11	0,437	A	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,861	0,11	0,425	A	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,833	0,11	0,422	A	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,944	0,11	0,434	A	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	4,000	0,11	0,440	A	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	4,000	0,11	0,440	A	Sangat Baik
	Jumlah	34,917	0,99	3,841	A	96,02%

Berdasarkan hasil survey dan analisa data jawaban responden dalam pengisian kuesioner, dapat dilakukan perhitungan untuk memperoleh nilai rata-rata per unsur, nilai rata-rata tertimbang perunsur dan pada akhirnya dapat diperoleh nilai IKM nya serta kualitas kinerja. Hasil perhitungan selengkapnya tercantum dalam tabel berikut:

Dari tabel di atas terlihat bahwa skor hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah **3,841** dan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah **96,02 %** dan termasuk dalam kategori **A** dengan kinerja **Sangat Baik**.

Dari hasil tersebut dapat dilihat Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebesar 3,841/96,02 % melebihi target yang ditetapkan sebesar 95%.

SASARAN 2

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022.

Tingkat capaian indikator kinerja persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada tahun 2022 telah memenuhi target 100%.

Pencapaian target indikator kinerja ini dapat dijelaskan bahwa berkas perkara yang putus sejumlah 62 (enam puluh dua) perkara, telah dikirimkan Salinan Putusan ke para pihak tepat waktu. Adapun capaian target indikator pada indikator kinerja tersebut digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100 %	100 %

Berikut tabel capaian indikator kinerja pada persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Bulan	Putus	Salinan Putusan Dikirim ke Para Pihak
Januari	0	0
Februari	1	1
Maret	8	8
April	6	6
Mei	8	8
Juni	9	9
Juli	3	3
Agustus	6	6

September	6	6
Oktober	2	2
November	8	8
Desember	5	5
Jumlah	62	62

Sumber Data: Laporan Perkara Tahun 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat capaian indikator kinerja Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu pada tahun 2022 telah sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

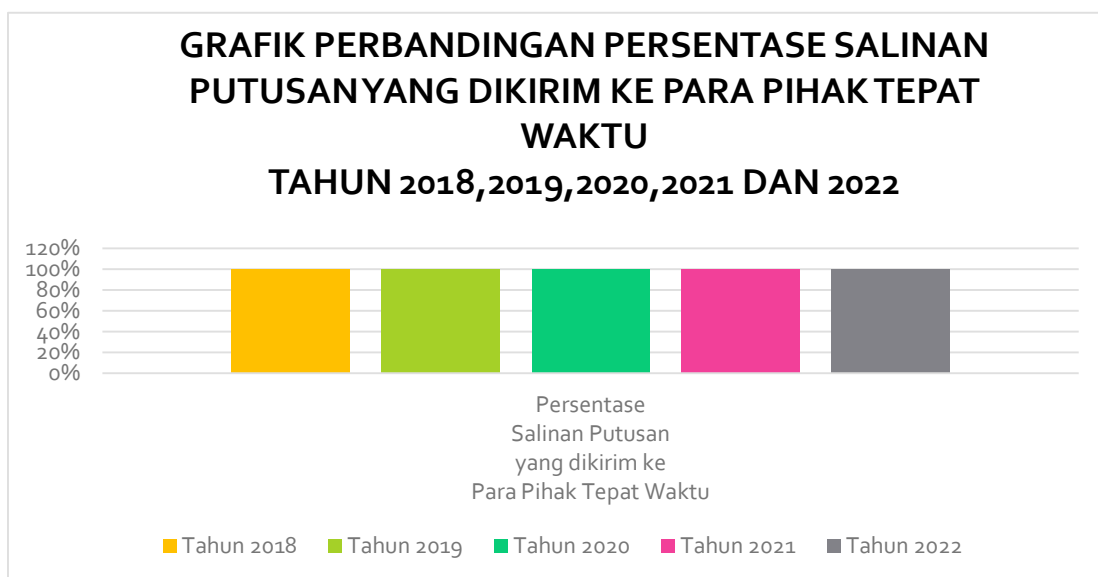


	Dikirim ke para pihak tepat waktu
Perkara putus	62
Salinan putusan dikirim tepat waktu	62

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Capaian indikator kinerja Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu pada tahun 2022 berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase Salinan Putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 sebesar 100% (seratus persen). Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja										Ket.	
	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	Pencapaian target terpenuhi	



- c. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja					Ket	
	Realisasi						Target Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	-	-	100%	target persentase jangka menengah yang ditentukan tercapai

Pencapaian realisasi target kinerja pada indikator kinerja Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 tercapai sesuai target tahunan dan target jangka menengah yang telah ditetapkan. Atas dasar capaian tersebut diharapkan persentase target jangka menengah sebesar 100% akan tetap bisa tercapai pada tahun yang akan datang.

d. Analisis keberhasilan atau peningkatan kinerja dan analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Capaian pada indikator kinerja Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu merupakan dari perwujudan penyelesaian perkara tepat waktu dan publikasi perkara (one day publish) sehingga setelah Majelis Hakim membacakan putusannya diikuti dengan kesiapan produk putusan tersebut berupa petikan putusan dan salinan putusan untuk disampaikan kepada para pihak sesuai dengan SOP dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pencapaian pada indikator kinerja Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu dengan capaian 100% (serratus) persen pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 menunjukkan Aparatur Teknis dan Non Teknis pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan konsisten dalam pelaksanaan indikator kinerja tersebut. Disiplin kerja para aparatur atau personel Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bagian merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

Bahwa seluruh aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memiliki komitmen yang kuat untuk terhindar dari perbuatan yang koruptif, berperilaku bersih dan melayani serta selalu menjaga integritas dalam setiap penyelesaian perkara baik Hakim, Panitera, Panitera Pengganti maupun oleh tenaga non teknis Pengadilan.

SASARAN 3

MENINGKATKAN AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Terwujudnya sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan diukur dengan menetapkan 1 (satu) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2022 dapat digambarkan pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	100%	100 %	100 %

Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

a. **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022.**

Capaian indikator kinerja pada indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada Pengadilan Militer diwujudkan dengan pelaksanaan Sidang Keliling yang merupakan salah satu kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Sidang keliling dilaksanakan guna menyelesaikan perkara yang lokasi kesatuan terdakwa atau tempat tinggal para Saksi dinilai terlalu jauh sehingga menyulitkan Terdakwa atau Saksi untuk menghadiri persidangan.

Selama tahun 2022 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melaksanakan 1 (satu) kali Pelaksanaan Sidang Keliling yaitu di Kota Tarakan bertempat di Pengadilan Negeri Tarakan berkas perkara yang dirensidkan sebanyak 4 (empat) berkas perkara.

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan (**sidang keliling**) pada tahun 2022 telah memenuhi target sebesar 100% (seratus persen). Perkara yang diputus pada pelaksanaan sidang keliling sebanyak 2 (dua) perkara dari 4 (empat) perkara yang dirensidkan sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Rensid Perkara Sidang Keliling	Perkara yang Diputus	Perkara Putus di Gedung Pengadilan	Ket
4 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	-

**GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE SALINAN
PUTUSANYANG DIKIRIM KE PARA PIHAK TEPAT
WAKTU
TAHUN 2018,2019,2020,2021 DAN 2022**



d. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

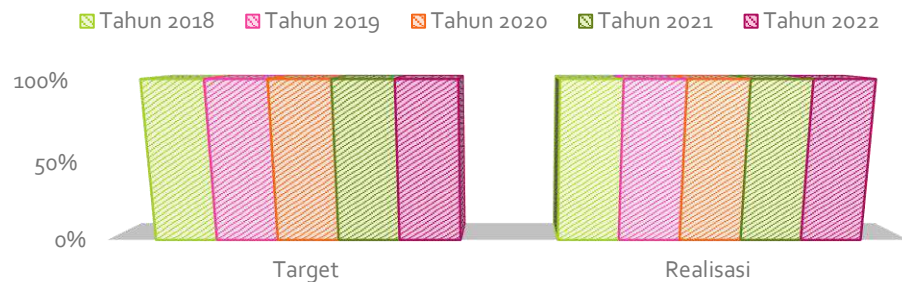
Capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (sidang keliling) tahun 2022 dengan capaian persentase 100% (seratus persen), berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling) pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 sebesar 100% (seratus persen) sedangkan pada tahun 2022 tidak memenuhi target pencapaian kinerja dikarenakan terdapat 2 (dua) perkara diputus di Gedung Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tahun	Rensid Perkara Sidang Keliling	Perkara Putus (Sidang Keliling)	Perkara Putus di Gedung Pengadilan
2018	9 perkara	9 perkara	
2019	8 perkara	8 perkara	
2020	5 perkara	5 perkara	-
2021	3 perkara	3 perkara	-
2022	4 perkara	4 perkara	2 perkara

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian target kinerja secara persentase pada tahun 2022 belum memenuhi target pencapaian kinerja yang ditetapkan sebesar 100% dikarenakan terdapat 2 (dua) perkara diputus di Gedung Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Berikut tabel perbandingan capaian indikator kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling) pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022.

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja										Ket.
	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan. (sidang keliling)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50 %	Pencapaian target belum terpenuhi dikarenakan terdapat 2 (dua) perkara diputus di Gedung Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

**GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE
PERKARA YANG DISELESAIKAN
DILUAR GEDUNG PENGADILAN
TAHUN 2018, 2019, 2020, 2021 DAN
2022**



- c. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dettgan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling) pada tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja						Ket
	Realisasi					Target Jangka Menengah	
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (sidang keliling)	100%	100%	50%	-	-	100%	target persentase jangka menengah yang ditentukan terpenuhi

Pencapaian realisasi target kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling) pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 telah tercapai sesuai target tahunan yang telah ditetapkan dan capaian persentase kinerja tahun 2022 telah

mencapai persentase target jangka menengah yang telah ditetapkan yaitu 100% (seratus persen). Sedangkan pada tahun 2022 belum tercapai sesuai target tahunan yang ditetapkan dikarenakan terdapat 2 (dua) perkara dengan alasan teknis dan waktu sehingga perkara tersebut persidangannya dilanjutkan di Gedung Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan telah diputus.

d. Analisis keberhasilan atau peningkatan kinerja dan analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Pada tahun 2022 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan melaksanakan 1 (satu) kali Sidang Keliling yang dilaksanakan di Kota Tarakan, pelaksanaan sidang tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tarakan. Pada DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MARI pagu anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sidang keliling pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 48.600.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) sehingga pelaksanaan sidang keliling tersebut hanya bisa dilakukan 1 (satu) kali. Dengan pagu yang tersedia tersebut.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam penyelesaian perkara melalui sidang keliling dengan menyidangkan perkara melebihi jumlah target 4 (empat) perkara yang harus diselesaikan sesuai DIPA tahun 2022, pada pelaksanaan sidang keliling tersebut Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyidangkan dan memutus 2 (dua) perkara dikarenakan terdapat 2 (dua) perkara dengan alasan teknis dan waktu sehingga perkara tersebut persidangannya dilanjutkan di Gedung Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan telah diputus. Sehingga dengan pagu yang tersedia tersebut tercapai efektifitas jumlah penyelesaian perkara, target penyelesaian perkara yang tercantum pada DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MARI. Namun demikian

Mengingat luasnya wilayah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang mencakup Wilayah Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dibutuhkan peningkatan anggaran agar pelaksanaan sidang keliling dapat dilaksanakan secara periodik sehingga dapat mendukung percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan melalui sidang keliling atau sidang diluar gedung Pengadilan.

B. Realisasi Anggaran

Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif maka diperlukan mekanisme pengelolaan keuangan Negara yang tepat sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai pada tahap pelaporan. Pada tahun anggaran 2022 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mendapat alokasi dana dari APBN yang tertuang dalam 2 (dua) DIPA yaitu DIPA (01) Badan Urusan Administrasi MARI dan DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MARI. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2022 dan penjabarannya tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) satuan kerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Program kerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh unit eselon I Mahkamah Agung RI, dimana ada 3 (tiga) program kerja yang harus dilaksanakan oleh satker Pengadilan Militer I-07 Balikpapan antara lain sebagai berikut:

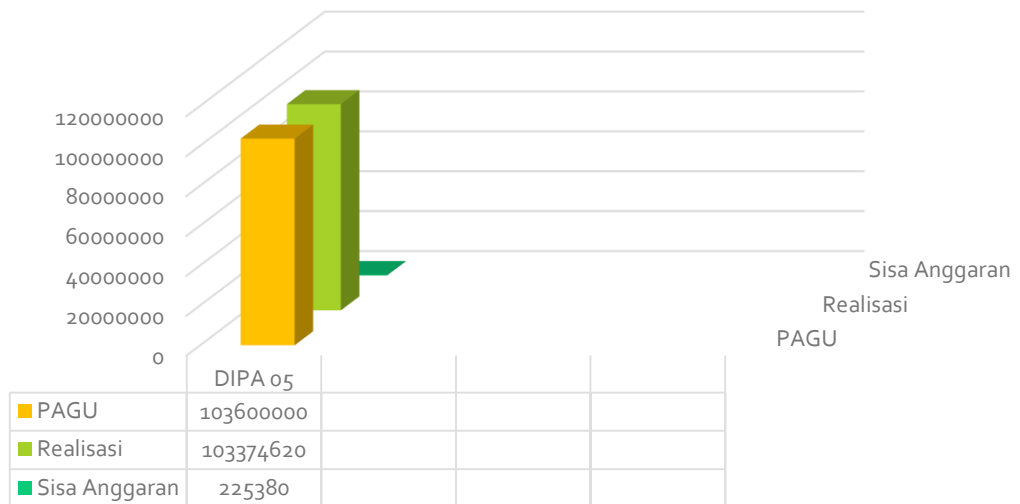
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Perkantoran

Program kerja di atas masing-masing didukung dengan anggaran yang telah direncanakan dalam APBN tahun 2022, sehingga program kerja tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasil *outcome* maupun *output* nya. Akuntabilitas anggaran tahun 2022 yang mendukung program kerja tersebut dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel dan grafik berdasarkan Revisi DIPA terakhir sebagai berikut:

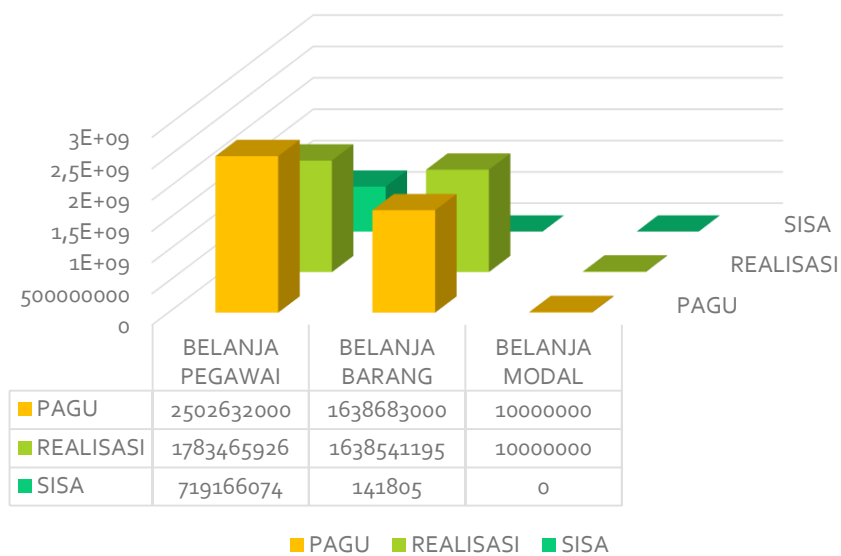
No	Program Kerja	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.	Rp 103.600.000,-	Rp 103.374.620,-	Rp 225.380,-	99,78
2	Program Dukungan Manajemen Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 4.141.315.000,-	Rp 3.422.007.121,-	Rp 719.307.879,-	82,63
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 10.000.000,-	Rp 10.000.000,-	0	100

**GRAFIK REALISASI ANGGARAN PROGRAM DIPA (01) BUA MARI DAN DIPA (05) DIRJEN
BADILMILTUN MARI TAHUN 2022**

DIPA 05



DIPA 01



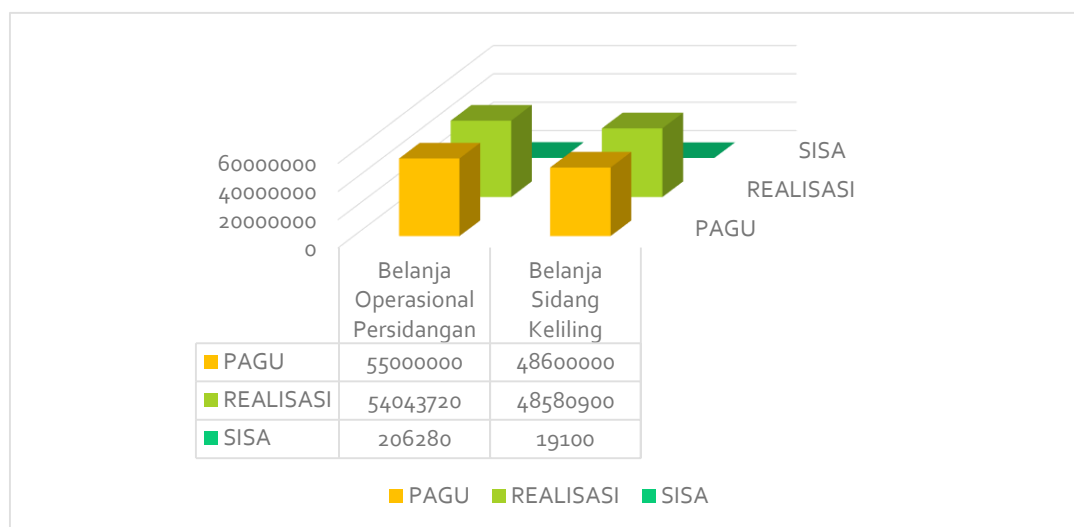
PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2022

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Pada program ini terdapat kegiatan peningkatan manajemen peradilan militer yang merupakan salah satu kegiatan yang terdapat pada DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MARI, pada tahun anggaran 2022 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 103.600.000,- (Seratus Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah.) adapun rincian realisasi anggaran pada program tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	Belanja Operasional Persidangan	Rp 55.000.000,-	Rp 54.043.720,-	Rp 206.280,-	99,62
2	Belanja Sidang Keliling	Rp.48.600.000,-	Rp 48.580.900,-	Rp 19.100,-	99,96
TOTAL		Rp.103.600.000,-	Rp 103.374.620,-	Rp 225.380,-	99,78

GRAFIK REALISASI ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN MILITER TAHUN 2022



Pada program peningkatan manajemen peradilan militer pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun anggaran 2022 terdapat 2 (dua) kali revisi anggaran. Revisi dilaksanakan dalam rangka perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA.

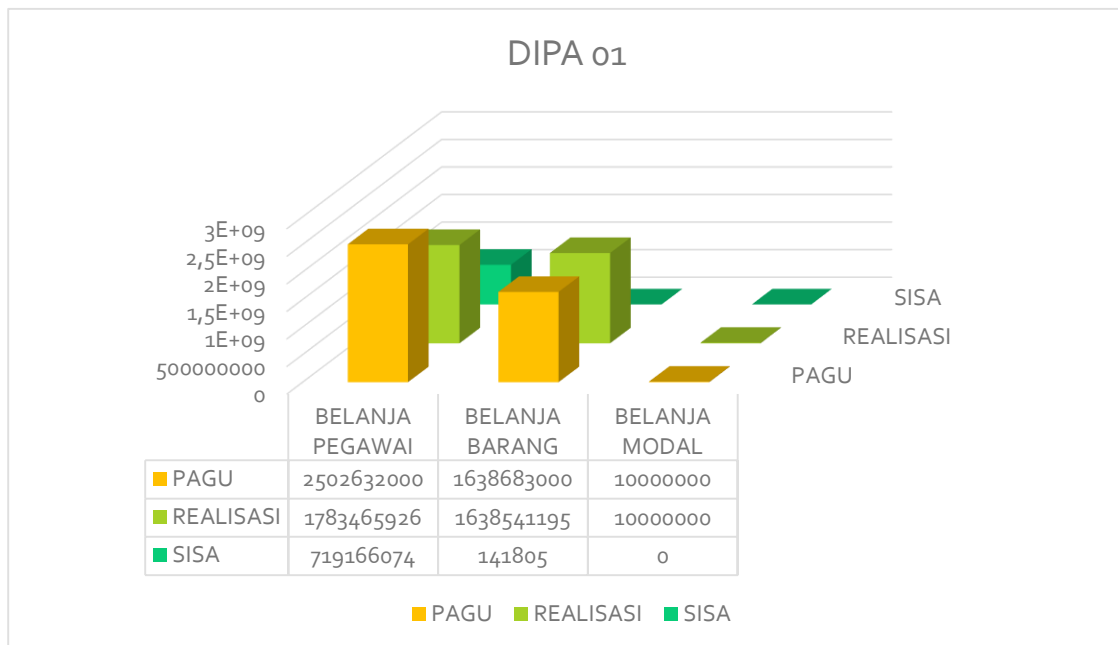
Realisasi anggaran pada program ini pada tahun 2022 terserap 99.78% (Sembilan Puluh Sembilan koma Tujuh Puluh Delapan Persen), penyerapan anggaran sudah mencapai angka yang sangat memuaskan karena pagu anggaran hampir terserap habis.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Pada program ini terdapat kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang merupakan salah satu kegiatan yang terdapat pada DIPA (01) BUA MARI, pada tahun anggaran 2022 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 4.151.315.000,- (*Empat Miliar Seratus Lima Puluh Satu Juta tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*) adapun rincian realisasi anggaran pada program tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp 2.502.632.000,-	Rp 2.502.632.000,-	Rp. 1.783.465.926,-	Rp. 719.166.074,-	71,26
2	Belanja Operasional Perkantoran	Rp. 1.638.683.000,-	Rp. 1.638.683.000,-	Rp 1.638.541.195,-	Rp. 141.805,-	99,99
3	Belanja Modal	Rp 10.000.000,-	Rp 10.000.000,-	Rp 10.000.000,-	0	100
TOTAL		Rp. 4.151.315.000,-	Rp. 4.151.315.000,-	Rp. 3.432.007.121,-	Rp 719.307,879,-	82,67

GRAFIK REALISASI ANGGARAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI TAHUN 2022



Pada Program Dukungan Manajemen Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun anggaran 2022 terdapat 3 (tiga) kali revisi anggaran. Realisasi anggaran pada program ini sangat memuaskan mencapai 82,67% (Delapan Puluh Dua koma Enam Puluh Tujuh Persen) artinya pagu anggaran yang tersedia pada DIPA terserap dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan akun belanja yang tersedia pada POK. Dari tabel dan grafik di atas terlihat bahwa sisa anggaran terbesar terdapat pada belanja operasional yakni pada belanja operasional yakni pada belanja langganan daya dan jasa dan pada belanja gaji dan tunjangan pegawai.

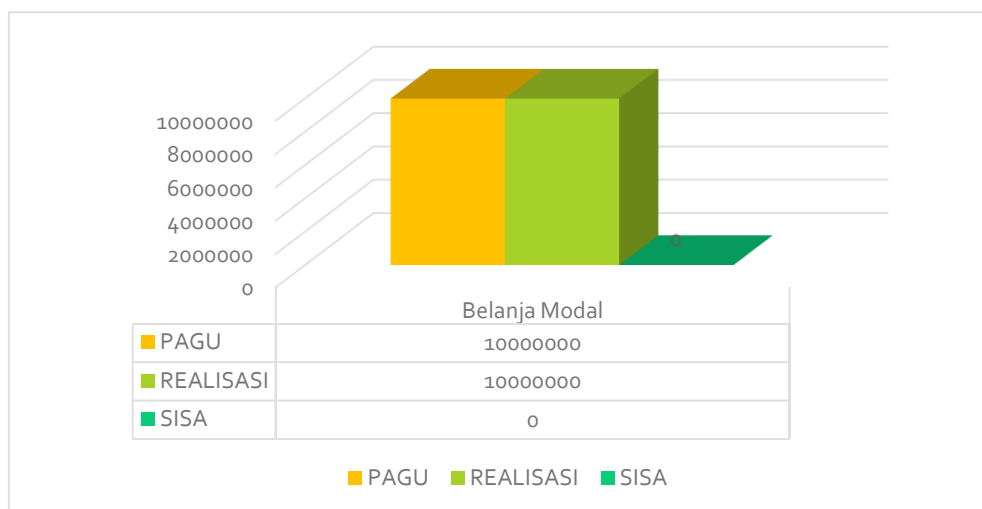
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Perkantoran

Pada program ini terdapat kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung yang merupakan salah satu kegiatan yang terdapat pada DIPA (01) BUA MARI, pada tahun anggaran 2022 memperoleh

pagu sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pengadaan perangkat pengolah data dan sarana prasarana disabilitas. Adapun rincian realisasi anggaran pada program tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa	%
Belanja Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi dan	Rp. 10.000.000,-	-	Rp 10.000.000,-	0	100
TOTAL	Rp. 10.000.000,-	-	Rp 10.000.000,-	0	100

GRAFIK REALISASI ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LAYANAN PERKANTORAN TAHUN 2022



Pada tabel dan grafik realisasi anggaran di atas terlihat bahwa penyerapan pagu anggaran pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Perkantoran terserap 100% (Seratus persen). Dengan demikian penggunaan dan penyerapan anggaran dilaksanakan dengan sangat maksimal sesuai dengan perencanaan dan pemanfaatan anggaran sebagaimana mestinya.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun anggaran 2022 yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dalam bab penutup ini perlu disampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan merupakan tindak lanjut atau respon atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana strategis.

LKjIP Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI secara garis besar, Dirjen Badilmiltun MARI dan tentunya secara khusus Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Indikator Kinerja Utama ditetapkan berdasarkan acuan dari Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaharuan Peradilan Indonesia 2010-2035_Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1. Bahwa LKjIP Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2022 ini secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

2. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), namun demikian masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran khususnya dalam peningkatan percepatan penyelesaian perkara sehingga akan mendapatkan hasil capaian yang maksimal.
3. Bahwa diharapkan LKjIP Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

B. *Saran*

1. Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sangat diperlukan peningkatan keterampilan dan kemampuan baik bagi Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Panitera Pengganti dan Pejabat Kesekretariatan serta seluruh staf lainnya untuk mengikuti diklatpim serta pelatihan-pelatihan, bimtek maupun diklat.
2. Wilayah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang cukup luas meliputi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai untuk melaksanakan sidang keliling dalam rangka percepatan penyelesaian perkara yaitu dengan menambah alokasi anggaran sidang keliling pada tahun 2024.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun anggaran 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Satker Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Balikpapan, Januari 2023
Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Thamrin, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13620/P

Lampiran – Lampiran

- LAMPIRAN:**
1. Struktur Organisasi
 2. Peta Wilayah Hukum
 3. Reviu Indikator Kinerja Utama
 4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
 5. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) tahun 2023
 6. Metrik Rencana Strategis 2022-2024
 7. SK Tim Penyusunan Laporan LKjIp Tahun 2022
 8. Kerangka Pendanaan
 9. Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2022
 10. Laporan Realisasi DIPA (01) BUA MARI Tahun 2022 dan Laporan DIPA (5) Dirjen Badilmiltun Tahun 2022

1. Struktur Organisasi



2. Peta Wilayah Hukum



3. Reviu Indikator Kinerja Utama



PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
Nomor : W1-Mil07/59 /KP.01/KEP/II/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-07 Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal: 3 Januari 2023



Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Thamrin, S.H., M.H.

Kolonel Laut (H) NRP13620/P

LAMPIRAN I KEPUTUSAN

Nomor : W1-Mil07/59/KP.01/KEP/I/2023
Tanggal : 3 Januari 2023

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Kolonel Laut (KH) Thamrin, S.H.,M.H.
2	Penanggung Jawab	Letkol Sus Erwin Kristiyono, S.H.,M.H.
3	Pengarah	Mayor Chk Tamrin, S.H.
4	Koordinator	Hery Pujiyanto, S.H.
5	Sekretaris	Sri Handajani
6	Anggota	1. Bella Shafira, A.Md.A.B. 2. Rendy Pratama Putra, S.Kom. 3. Muhammad Subky, S.H.
7	Sekretariat	Sugeng Nuraini

W1-Mil07/59/KP.01/KEP/I/2023



Thamrin, S.H.,M.H.
Kolonel Laut (H) NRP13620/P



PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
JL. SYARIFUDDIN YOES NO. 39 SEPINGGAN BALIKPAPAN
E-mail : balikpapan@dilmil.org
Telp/Fax : 0542-8520024

Balikpapan, 03 Januari 2023

Nomor : W1-Mil07/Und-04/I-07/II/2023
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Kepada
Yth. Seluruh Personel Dilmil I-07
Balikpapan
di
Tempat

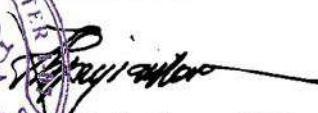
Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam acara rapat penyusunan Rencana Strategis (Renstra 2020-2024), penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), penyusunan dan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, untuk dapat menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Senin, 09 Januari 2023
Waktu : Pukul 09.00 wita s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dilmil I-07 Balikpapan
Notulis : PPNPN M.Subky, S.H

Demikian undangan ini disampaikan untuk diketahui mengingat sangat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran bapak/ibu tepat pada waktunya. Atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
Sekretaris



Henry Pujiyanto, S.H.
Meyor Chk NRP 2920087520571



PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
JL. SYARIFUDDIN YOES NO. 39 SEPINGGAN BALIKPAPAN
E-mail : balikpapan@dilmil.org
Telp/Fax : 0542-8520024

NOTULEN RAPAT

- | | | |
|------|--------------------------|---|
| I. | Pelaksanaan Hari/tanggal | : Senin, 09 Januari 2023 |
| | Jam | : 09.00 wita |
| | Tempat | : Ruang Rapat Kantor Dilmil I-07 Balikpapan |
| II. | Pimpinan Rapat | : Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan |
| III. | Susunan Acara | : 1. Pembukaan |
| | | 2. Pembahasan Rapat |
| | | 3. Saran/Masukan |
| | | 4. Penutup |

Adapun isi dari Rapat pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 tersebut adalah Pembahasan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) secara keseluruhan, Terdiri dari :

- I. Review Renstra (Rencana Strategi) 2020-2024
- II. IKU (Indikator Kinerja Utama)
- III. RKT (Rencana Kinerja Tahunan)
- IV LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)
- V. PKT (Perjanjian Kinerja Tahunan)

I. REVIEW RENSTRA

Terkait penambahan renstra secara umum Kinerja Utama dan Indikator tidak ada perubahan. Hanya saja diperlukan perubahan pada target capaian sehingga di dapat laporan akuntabilitas yang sesuai dengan kondisi riil didalam instansi pemerintahan. Sehingga laporan lebih akurat dan akuntabel.

Pada rapat ini diperoleh kesepakatan target capaian yang akan dituangkan di dalam Renstra oleh Kepala Pengadilan, Sekretaris, Panitera, dan para Kasubag antara lain:

1. Pada point terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparansi dan akuntabel.
 - a. Presentase sisa perkara pidana dan Lalu Lintas berapa target, realisasi, dan capaian yang telah dicapai setara target atau tidak.
 - Sisa Perkara pidana militer target 95%
 - Sisa perkara pelanggaran lalu lintas target 100%

- b. Persentase Sisa Perkara Pidana dan Lalu Lintas yang telah diselesaikan dicapai setara target atau tidak.
 - Sisa Perkara Pidana yang telah diselesaikan tepat waktu 95, %
 - Sisa Perkara Pidana Lalu Lintas yang telah diselesaikan 100%
- c. Persentase Sisa Perkara Pidana dan Lalu Lintas yang telah diselesaikan tepat waktu.
 - Sisa Perkara Pidana yang telah diselesaikan tepat waktu Target 95%
 - Sisa Perkara Pidana Lalu Lintas yang telah diselesaikan tepat waktu Target 100%
- d. Persentase Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Target 90% Capaian 95,23%
- e. Persentase perkara yang tidak menggunakan Upaya Hukum Kasasi Target 90% Capaian 91,39%
- f. Indeks Responden Pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Target 95%

II. IKU (Indikator Kinerja Utama)

Di dalam IKU akan dituangkan hasil kesepakatan atas target capaian pada Renstra Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

III. RKT (Rencana Kinerja Tahunan)

Rencana kerja yang akan dituangkan sebelum ada Renstra Baru terkait Kinerja Utama dan Rencana Kerja Lima Tahunan, Maka Rencana Kerja Tahunan, mengikuti hasil review Renstra.

IV. LKJIP 2022

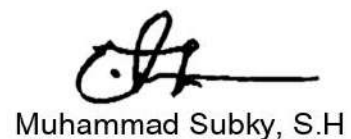
Laporan Kinerja harus segera diselesaikan sesuai dateline yang diberikan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Sehingga tidak akan mempengaruhi laporan hasil evaluasi terkait ketepatan waktu penyelesaian laporan. Diharapkan bagian-bagian terkait untuk membantu pengumpulan data agar operator dapat segera menyelesaikan pelaporan.

Rapat di selesaikan dan ditutup langsung oleh Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan


Thamrin, S.H., M.H
Kolonel Laut (H) NRP 13620/P

Notulis


Muhammad Subky, S.H



PENGADILAN MILITER I – 07 BALIKPAPAN
JL. SYARIFUDDIN YOES NO. 39 BALIKPAPAN
E-mail : balikpapan@dilmil.org
Telp. (0542) 8520025, (0542) 8520026, Fax : (0542) 8520024

ABSENSI KEGIATAN

Hari/Tanggal : Senin, 09 Januari 2023

Perihal : Penyusunan Indikator kinerja Utama (IKU)

NO	NAMA NRP / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	KET.
1	Kolonel Laut (KH) Thamrin, S.H., M.H. 13620/P	Kadilmil		
2	Letnan Kolonel Sus Erwin Kristiyono, S.H., M.H. NRP 527136	Wakadilmil		
3	Mayor Chk Hery Pujiatono, S.H. 2920087520571	Sekretaris		
4	Mayor Chk Tamrin, S.H. 21960347280475	Panitera		
5	Sri Handajani Penata TK I (IId) 196712261991032002	Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan		
6	Bella Shafira, A.Md.A.B. Pengatur (IIC) 199807022022032015	Pengelola Perkara		
7.	Rendy Pratama Putra, S.Kom.	PPNPN		
8.	Muhammad Subky, S.H.	PPNPN		

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Thamrin, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13620/P

Kasubag Umum dan Keuangan

Puspa Ningsih
Penata Tk. I NIP 196508271987032002



PENGADILAN MILITER I – 07 BALIKPAPAN

JL. SYARIFUDDIN YONES NO. 39 BALIKPAPAN

E-mail : balikpapan@dilmil.org

Telp. (0542) 8520025, (0542) 8520026, Fax : (0542) 8520024

DOKUMEN KEGIATAN /FOTO KEGIATAN



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER I - 07 BALIKPAPAN**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lama 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Perkara pidana/Kejahatan dan Pelanggaran lalu lintas.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.		c. Presentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. - Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Stakeholder Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 - Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan	Panitera dan Sekretaris	Laporan Triwulan
5.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan - Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim ke Papera, Odml, PM (Penyidik POM) dan Ankum sesuai dengan ketentuan. - Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. - Papera; Perwira Penyerah Perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			• Odnil : Oditur Militer. • PM : Polisi Militer • Anlum : Atasan yang berhak menghukum.		
6.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Teroinggirkan	Persentase Perakra yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	Jumlah Perkara Yang diselesaikan diluar gedung pengadilan X100% Jumlah Perkara yang diajukan dirensidkan diluar gedung pengadilan Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah perakra yang telah diputus diluar gedung pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara. • Perkara yang diajukan adalah perakra yang direncakan untuk disidangkan (dirensidkan).	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024



PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

Jl. Syariffudin Yoes No. 39 Sepinggan Balikpapan

Telp/Fax. (0542) 8520024

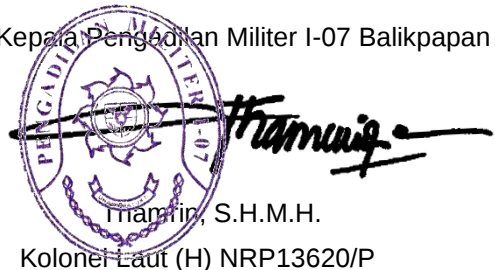
Email : balikpapan@dilmil.org

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
2.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
3.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
4.		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95
5.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
6.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100

Balikpapan, 3 Januari 2023

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



 H. Hamrin, S.H.M.H.

Kolonel Laut (H) NRP13620/P

5. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

Jl. Syariffudin Yoes No. 39 Sepinggan Balikpapan

Telp/Fax. (0542) 8520024

Email : balikpapan@dilmil.org

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Thamrin, S.H.,M.H.

Jabatan : Kepala Pengadilan Militer I - 07 Balikpapan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Tuty Kiptiani, SH., MH.

Jabatan : Kepala Pengadilan Militer Tinggi - I Medan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Pengadilan Militer Tinggi - I Medan

Tuty Kiptiani, S.H.,M.H.
Laksamana Pertama TNI

Balikpapan, 6 Januari 2023
Pihak Pertama
Kepala Pengadilan Militer I - 07 Balikpapan

Thamrin, S.H.,M.H.
Korvet Laut (KH) NRP13620/P

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
2.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
3.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
4.		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95
5.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
6.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 3.992.345.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 414.761.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Rp. 110.840.000,-

Balikpapan, 6 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Pengadilan Militer Tinggi - I Medan


 Tutty Kiptiani, S.H.,M.H.
 Laksamana Pertama TNI

Pihak Pertama
Kepala Pengadilan Militer I - 07 Balikpapan


 Hanirip, S.H.,M.H.
 Kolonel Laut (KH) NRP13620/P

6. Metrik Rencana Strategis 2022-2024

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

INSTANSI : PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
 VISI : TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN YANG AGUNG
 MISI : 1. MENJAGA KEMANDIRIAN PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
 : 2. MENINGKATKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN
 : 3. MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN, PROFESIONALISME TENAGA TEKNIS DAN NON TEKNIS
 : 4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENEN- GAH	SASARAN		TARGET					SASARAN				
	URAIAN	INDIKATOR		URAIAN	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	95%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	a.Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) b.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung c.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama yang tepat waktu	136 Perkara	Rp. 62.240.000

		b.Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%		b.Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	a.Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) b.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung c.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding		
		c.Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90%		c .Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	a.Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) b.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		

											Mahkamah Agung c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			
		d. Indeks persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	95%		d. Indeks persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90%	90%	95%	95%	95 %	a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan		
2.	Tersampaikan salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100 %	100 %	100%	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu		

3.	Tercapainya akses peradilan bagi masyarakat kurang mampu	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100 %	100 %	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Pembinaan Administrasi dan	Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	10 Perkara	Rp. 48.600.000,-
----	--	--	------	---	--	------	-------	-------	------	------	---	----------------------------	---	------------	------------------

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Thamrin

Thamrin, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13620/P

1. SK Tim Penyusunan Laporan LKjIp Tahun 2022



PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
Nomor : W1-Mil07/60/KP.01/KEP/II/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022 PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

- Menimbang : d. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- e. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2022 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022 PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal: 3 Januari 2023

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Thamrin, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP13620/P

LAMPIRAN I KEPUTUSAN

Nomor : W1-Mil07/60/KP.01/KEP/II/2023
Tanggal : 3 Januari 2023

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022 PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Kolonel Laut (H) Thamrin, S.H.,M.H.
2	Koordinasi Validasi Data	Letkol Sus Erwin Kristiyono, S.H.,M.H.
3	Ketua	Mayor Chk Tamrin, S.H.
4	Sekretaris	Sri Handajani
5	Anggota	1. Staf Subbag Umum Keuangan 2. Staf Subbag Kepegawaian 3. Staf Subbag PTIP 4. Staf Subbag Kepaniteraan
6	Tim Reviu Laporan Kinerja	Puspa Ningsih

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Kolonel Laut (KH) NRP13620/P

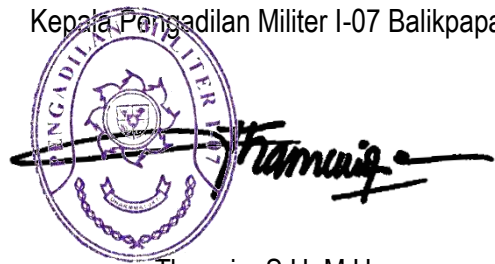
LAMPIRAN II KEPUTUSAN

Nomor : W1-Mil07/60/KP.01/KEP/II/2023
Tanggal : 3 Januari 2023

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022 PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

NO	JABATAN	TUGAS
1	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
2	Koordinasi Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah
4	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing unit eselon I
6	Tim Reviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Thamrin, S.H.,M.H.

Kolonel Laut (H) NRP13620/P



PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
JL. SYARIFUDDIN YOES NO. 39 SEPINGGAN BALIKPAPAN
E-mail : balikpapan@dilmil.org
Telp/Fax : 0542-8520024

Balikpapan, 03 Januari 2023

Nomor : W1-Mil07/Und-04/I-07/I/2023
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Kepada
Yth. Seluruh Personel Dilmil I-07
Balikpapan
di
Tempat

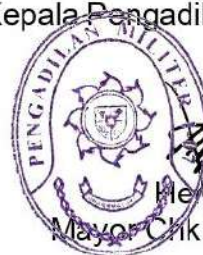
Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam acara rapat penyusunan Rencana Strategis (Renstra 2020-2024), penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), penyusunan dan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, untuk dapat menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Senin, 09 Januari 2023
Waktu : Pukul 09.00 wita s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dilmil I-07 Balikpapan
Notulis : PPNPN M.Subky, S.H

Demikian undangan ini disampaikan untuk diketahui mengingat sangat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran bapak/ibu tepat pada waktunya. Atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
Sekretaris



[Signature]
Hery Pujiyanto, S.H.
Mayor Ckk NRP 2920087520571



PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
JL. SYARIFUDDIN YOES NO. 39 SEPINGGAN BALIKPAPAN
E-mail : balikpapan@dilmil.org
Telp/Fax : 0542-8520024

NOTULEN RAPAT

- I. Pelaksanaan Hari/tanggal : Senin, 09 Januari 2023
Jam : 09.00 wita
Tempat : Ruang Rapat Kantor Dilmil I-07 Balikpapan
- II. Pimpinan Rapat : Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
- III. Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Pembahasan Rapat
3. Saran/Masukan
4. Penutup

Adapun isi dari Rapat pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 tersebut adalah Pembahasan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) secara keseluruhan, Terdiri dari :

- I. Review Renstra (Rencana Strategi) 2020-2024
- II. IKU (Indikator Kinerja Utama)
- III. RKT (Rencana Kinerja Tahunan)
- IV LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)
- V. PKT (Perjanjian Kinerja Tahunan)

V. REVIEW RENSTRA

Terkait penambahan renstra secara umum Kinerja Utama dan Indikator tidak ada perubahan. Hanya saja diperlukan perubahan pada target capaian sehingga di dapat laporan akuntabilitas yang sesuai dengan kondisi riil didalam instansi pemerintahan. Sehingga laporan lebih akurat dan akuntabel.

Pada rapat ini diperoleh kesepakatan target capaian yang akan dituangkan di dalam Renstra oleh Kepala Pengadilan, Sekretaris, Panitera, dan para Kasubag antara lain:

- 1. Pada Point Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparansi dan akuntabel.
 - a. Presentase sisa perkara pidana dan Lalu Lintas berapa target, realisasi, dan capaian yang telah dicapai setara target atau tidak.
 - Sisa Perkara pidana militer target 95%
 - Sisa perkara pelanggaran lalu lintas target 100%

- b. Persentase Sisa Perkara Pidana dan Lalu Lintas yang telah diselesaikan dicapai setara target atau tidak.
 - Sisa Perkara Pidana yang telah diselesaikan tepat waktu 95, %
 - Sisa Perkara Pidana Lalu Lintas yang telah diselesaikan 100%
- c. Persentase Sisa Perkara Pidana dan Lalu Lintas yang telah diselesaikan tepat waktu.
 - Sisa Perkara Pidana yang telah diselesaikan tepat waktu Target 95%
 - Sisa Perkara Pidana Lalu Lintas yang telah diselesaikan tepat waktu Target 100%
- d. Persentase Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Target 90% Capaian 95,23%
- e. Persentase perkara yang tidak menggunakan Upaya Hukum Kasasi Target 90% Capaian 91,39%
- f. Indeks Responden Pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Target 95%

VI. IKU (Indikator Kinerja Utama)

Di dalam IKU akan dituangkan hasil kesepakatan atas target capaian pada Renstra Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

VII. RKT (Rencana Kinerja Tahunan)

Rencana kerja yang akan dituangkan sebelum ada Renstra Baru terkait Kinerja Utama dan Rencana Kerja Lima Tahunan, Maka Rencana Kerja Tahunan, mengikuti hasil review Renstra.

VIII. LKJIP 2022

Laporan Kinerja harus segera diselesaikan sesuai dateline yang diberikan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Sehingga tidak akan mempengaruhi laporan hasil evaluasi terkait ketepatan waktu penyelesaian laporan. Diharapkan bagian-bagian terkait untuk membantu pengumpulan data agar operator dapat segera menyelesaikan pelaporan.

Rapat di selesaikan dan ditutup langsung oleh Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan


Thamrin, S.H., M.H
Kolonel Laut (H) NRP 13620/P

Notulis


Muhammad Subky, S.H



PENGADILAN MILITER I – 07 BALIKPAPAN

JL. SYARIFUDDIN YOES NO. 39 BALIKPAPAN

E-mail : balikpapan@dilmil.org

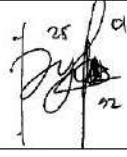
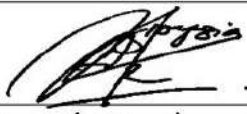
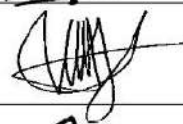
Telp. (0542) 8520025, (0542) 8520026, Fax : (0542) 8520024

ABSENSI KEGIATAN

Hari/Tanggal : Senin, 09 Januari 2023

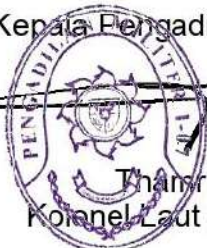
Perihal : Penyusunan LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

NO	NAMA NRP / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	KET.
1.	Kolonel Laut (KH) Thamrin, S.H., M.H. 13620/P	Kadilmil		
2	Letnan Kolonel Sus Erwin Kristiyono, S.H., M.H. NRP 527136	Wakadilmil		
3	Letnan Kolonel Chk Suradi Sungkowatmojo, S.H. NRP 2910013780370	Pokkimmil Gol. V		
4	Mayor Chk Tatang Sudjana Krida, S.H., M.H. NRP 11020000960372	Pokkimmil Gol. V	-	BPDilmil III-13 Madiun
5	Mayor Chk Hadiriyanto, S.I.P., S.H., M.H. NRP 11030043370581	Pokkimmil Gol. VI		
6	Mayor Chk Hery Pujiantono, S.H. 2920087520571	Sekretaris		
7	Mayor Chk Tamrin, S.H. 21960347280475	Panitera		
8	Letnan Satu Chk Ungsi Horas Manik, S.H., M.H. 21010029840882	Panitera Muda Pidana		
9	Pembantu Letnan Satu Suharto 21950303131074	Panitera Pengganti		
10	Pembantu Letnan Satu Arief Lesmono, S.H. 21970058261076	Panitera Pengganti		
11	Puspa Ningsih Penata TK I (IIId) 196508271987032002	Kasubbag Umum dan Keuangan		
12	Sri Handajani Penata TK I (IIId) 196712261991032002	Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan		

13	Sugeng Nuraini Penata Muda TK I (IIIb) 197306201998031003	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana		
14	Ryan Fernando, S.Sos. Penata Muda (IIIa) 199201252019031006	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama		
15	Sersan Mayor Fikriansyah 2106007699784	Bendahara		
16	Andi Satriyawan, A.Md. Pengatur (IIc) 199506252020121007	Pengelola Perkara		
17	Sarengat Penata Muda TK I (IIIb) 196910231991031005	Pengadministrasi Keuangan		
18	Bella Shafira, A.Md.A.B. Pengatur (IIc) 199807022022032015	Pengelola Perkara		
19	Indri Niswanti, A.Md.A.B. Pengatur (IIc) 199909202022032004	Pengelola Perkara		
20	Alfiani Hayaturrida Rusnawati, A.Md.	PPNPN		
21	Rendy Pratama Putra, S.Kom.	PPNPN		
22	Aloysia Maria Wahyu Widianingsih, S.Kom.	PPNPN		
23	Retno Andhika Dewi Irawan	PPNPN		
24	Muhammad Subky, S.H.	PPNPN		
25	Muh Jauhari	PPNPN		
26	Arga Aditya Robinsah	PPNPN		

27	Setiawan Ardy	PPNPN		
28	Monica Arliana, S.H.	PPNPN		

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Thahirin, S.H., M.H.
Korvet Laut (H) NRP 13620/P

Kasubag Umum dan Keuangan


Puspa Mingsih
Penata Tk.I NIP 196508271987032002



PENGADILAN MILITER I – 07 BALIKPAPAN

JL. SYARIFUDDIN YOES NO. 39 BALIKPAPAN

E-mail : balikpapan@dilmil.org

Telp. (0542) 8520025, (0542) 8520026, Fax : (0542) 8520024

DOKUMEN KEGIATAN /FOTO KEGIATAN



8. Kerangka Pendanaan

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Pendanaan				
			2020	2021	Prakiraan Maju			2020	2021	Prakiraan maju		
					2022	2023	2024			2022	2023	2024
Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum								65.420.000	98.809.000	103.600.000	110840.000	187.950.000
1058 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	1058 BCA Perkara Hukum Perseorangan	001.Pihak berpekara yang dilayani melalui siding diluar Gedung di Pengadilan Militer	10 PKR	10 PKR	10 PKR	10 PKR	10 PKR	48.600.000	48.600.000	48.600.000	48.600.000	124.800.000
		U03 Perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I-01 s.d III-19	81 PKR	81 PKR	93 PKR	136 PRK	115 PRK	168.20.000	48.209.000	55.000.000	62.240.000	63.150.000
Program Dukungan Manajemen								3.626.518.000	3.498.465.000	4.151.315.000	4.407.106.000	5.005.269.740
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	1066 EB Layanan Dukunagn Manajemen Internal	051. Dukungan manajemen non operasional satker daerah	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	8.600.000	5.000.000	4.634.000	8.654.000
		001. Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2.457.524.000	2.042.6320000	2.502.632.000	2.502.632.000	2.475.944.240
		002. Operasional dan Pemeliharaan kantor	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.343.994.000	1.409.733.000	1.633.683.	1.485.079.000	1.63.047.000

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Pendanaan				
			2020	2021	Prakiraan Maju			2020	2021	Prakiraan maju		
					2022	2023	2024			2022	2023	2024
1071 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparaturn Mahkamah Agung	1071 EBB Layanan sarana dan prasaranan ibternal	051 Layanan saranan Internal	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	25.000.000	-	-	351.500.000	917.624.000
		971.Layanan prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	37.500.000	10.000.000	63.261.000	-

9. Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2022

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
TAHUN 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN/UPAYA/STRATEGI/KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	95%	93,55 %	98,48 %	Pelaksanaan persidangan dan penyelesaian perkara tepat waktu
		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding.	90%	85,71 %	95,23 %	Realisasi masih belum mencapai target dikarenakan masih adanya pihak yg tidak puas dengan putusan baik dari pihak Terdakwa maupun dari pihak Oditur.
		c. Presentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	90%	82,25 %	91,39 %	Realisasi masih kurang dan belum mencapai target dikarenakan masih adanya pihak yg tidak puas dengan putusan baik dari pihak Terdakwa maupun dari pihak Oditur.
		d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	95%	99,76 %	105,01 %	Dari target yang ditetapkan dan realisasi dapat dilihat dari survey yang diberikan terhadap stakeholder bahwa mereka puas terhadap pelayanan yang ada di Dilmil I-07 Balikpapan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100 %	100 %	Pengiriman Salinan putusan kepada para pihak yang tepat waktu
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%	100 %	100 %	Untuk meningkatkan pelaksanaan sidang diluar Gedung Pengadilan (sidang keliling) perlu adanya penambahan biaya sehingga dapat menjangkau lebih banyak lagi .

Balikpapan, 3 Januari 2023

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



The block contains an official circular stamp of the Military Court I-07 Balikpapan. The stamp features a central emblem with a star and a banner, surrounded by the text 'PENGADILAN MILITER I-07' and 'BALIKPAPAN'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Thamrin, S.H.,M.H.

Korvet Laut (H) NRP 13620/P

10. Laporan Realisasi DIPA (01) BUA MARI Tahun 2022 dan Laporan DIPA (5) Dirjen Badilmiltun Tahun 2022.

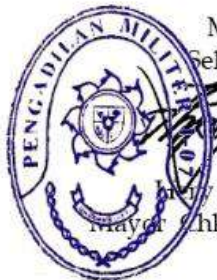


PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
JL. SYARIFUDDIN YOE NO. 39 SEPINGGAN BALIKPAPAN
E-mail : balikpapan@dilmil.org
Telp/Fax : 0542-8520024

**REALISASI ANGGARAN PROGRAM DIPA (01) BUA MARI DAN
DIPA (05) DIRJEN BADILMILTUN MARI TAHUN 2022**

No	Program Kerja	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.	Rp 103.600.000,-	Rp 103.374.620,-	Rp 225.380,-	99,78
2	Program Dukungan Manajemen Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 4.141.315.000,-	Rp 3.422.007.121,-	Rp 719.307.879,-	82,63
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 10.000.000,-	Rp 10.000.000,-	0	100

Balikpapan, 30 Desember 2022



Mengetahui,
Sekretaris/KPA

Pujiantono, S.H
NRP 2920087520571

Kasubbag Umum dan Keuangan

Puspa Ningsih
NIP 196508271987032002



PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
JL. SYARIFUDDIN YONES NO. 39 SEPINGGAN BALIKPAPAN
E-mail : balikpapan@dilmil.org
Telp/Fax : 0542-8520024

PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2022
DIPA (01) BUA MARI

No	Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp 2.502.632.000,-	Rp 2.502.632.000,-	Rp 1.783.465.926,-	Rp. 719.166.074,-	71,26
2	Belanja Operasional Perkantoran	Rp. 1.638.683.000,-	Rp. 1.638.683.000,-	Rp 1.638.541.195,-	Rp. 141.805,-	99,99
3	Belanja Modal	Rp 10.000.000,-	Rp 10.000.000,-	Rp 10.000.000,-	0	100
TOTAL		Rp. 4.151.315.000,-	Rp. 4.151.315.000,-	Rp. 3.432.007.121,-	Rp 719.307,879,-	82,67

Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa	%
Belanja Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi	Rp. 10.000.000,-	-	Rp 10.000.000,-	0	100
TOTAL	Rp. 10.000.000,-	-	Rp 10.000.000,-	0	100



Mengetahui,
Sekretaris/KPA

Heri Pujiantonno, S.H
Mayor Chk NRP 2920087520571

Balikpapan, 30 Desember 2022

Kasubbag Umum dan Keuangan

Puspa Ningsih
NIP 196508271987032002



PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
JL. SYARIFUDDIN YOE NO. 39 SEPINGGAN BALIKPAPAN
E-mail : balikpapan@dilmil.org
Telp/Fax : 0542-8520024

PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2022
DIPA (05) DIRJEN BADILMILTUN MARI

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	Belanja Operasional Persidangan	Rp 55.000.000,-	Rp 54.043.720,-	Rp 206.280,-	99,62
2	Belanja Sidang Keliling	Rp 48.600.000,-	Rp 48.580.900,-	Rp 19.100,-	99,96
TOTAL		Rp 103.600.000,-	Rp 103.374.620,-	Rp 225.380,-	99,78



Mengetahui,
Sekretaris/KPA

Heri Pujiyanto, S.H
NIP. 196508271987032002

Balikpapan, 30 Desember 2022

Kasubbag Umum dan Keuangan

Puspa Ningsih
NIP 196508271987032002